

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020



Dinas ESDM Provinsi NTB



@DESDMNTB



@desdmntb



desdm@ntbprov.go.id



www.desdm.ntbprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Majapahit No. 40 Mataram Telepon (0370) 621356 Faximile (0370) 625766



Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun kedua dalam periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, dimana Dinas ESDM diberikan amanah untuk melaksanakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Tahun 2020 juga merupakan bagian dari masa-masa yang berat untuk dilalui sebagai akibat adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak triwulan pertama 2020. Namun demikian ditegah pandemi dan keterbatasan anggaran disebabkan adanya refocusing. Untuk mencapai target Renstra dan RPJMD telah melaksanakan 10 Program dan 40 Kegiatan terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
7. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
8. Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah;
9. Program pencegahan kerusakan lingkungan;
10. Program pengembangan dan pemanfaatan energi.



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DALAM RENSTRA 2019-2023

		Target Realisasi Capaian			
	Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan GMP (%)	4,00%	0,87%	21,75%
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	95,09%	99,98%	105,14%
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum	Jumlah masyarakat yang terlayani air minum dari sumber air tanah (KK)	765 KK	425 KK	55,56%
	Meningkatnya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi (situs)	-	-	-
	Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (%)	6,62%	8,49%	128,25%



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ESDM

Listrik Murah dan Hemat 1.255 RTS
Sumur Bor Air Tanah 5 Unit
Digester Biogas 4 m³ 44 Unit

PERIZINAN BIDANG ESDM

Izin Bidang Minerba

IUP 322 dengan luas 135.311,96 Ha
IPR 5 dengan luas 27 Ha

Izin Bidang Ketenagalistrikan

IUJPTL 5 Izin

IO 4 Izin

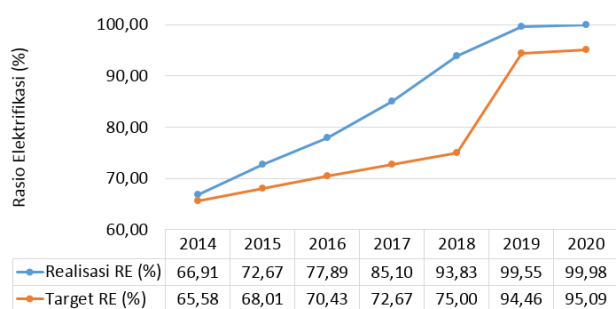
LIT 1 Izin

UPTL Kepentingan sendiri 20 Izin

Izin Bidang Air Tanah

SIPA 126 Izin

TARGET DAN REALISASI RASIO ELEKTRIFIKASI 2014-2020



KONDISI KELISTRIKAN

Rasio Elektrifikasi 99,98%

Persentase Desa Berlistrik 100% dari 1.143 Desa/Kel

Desa Berlistrik PLN 1.137 Desa/Kel

Desa Berlistrik Non PLN 6 Desa

Neraca Daya

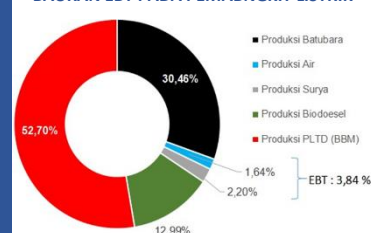
Daya Mampu 466,81 MW

Beban Puncak 381,98 MW

Cadangan 84,83 MW



BAURAN EBT PADA PEMANGKIT LISTRIK



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keuangan waktu sehingga dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020. Laporan ini memuat semua pencapaian kinerja Perangkat Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2020.

Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun kedua dalam periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, dimana Dinas ESDM diberi tugas untuk mendukung pencapaian Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan serta Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.

Misi tersebut mempunyai sasaran pada Misi 4 berupa meningkatnya pengelolaan *geopark* dengan indikator sasaran (IKK) persentase geosite yang tertata, serta sasaran pada Misi 5 berupa terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan indikator sasaran (IKK) rasio elektrifikasi. Namun demikian, dalam Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani pada tahun 2020 ada 5 (lima) sasaran strategis yang diperjanjikan yaitu : Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat melalui Rasio elektrifikasi; terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat dari sumber air tanah; Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar; Meningkatnya situs geologi sebagai cagar alam geologi; dan Meningkatnya peningkatan energi baruterbarukan melalui bauran energi.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2020 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban Dinas dalam melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban pembangunan sektor ESDM di Provinsi NTB.

Laporan ini sudah mengacu pada hasil review Inspektorat Provinsi NTB tahun sebelumnya dengan harapan dapat memberikan gambaran hasil

pembangunan yang telah dilakukan oleh segenap sumber daya yang dimiliki Dinas. Masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja dinas dimasa yang akan datang agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Provinsi NTB.

Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, semoga dicatat sebagai amal baik oleh Allah SWT, Amin.

Mataram, 15 Januari 2021

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620825 199103 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Operasional.....	5
C. Kedudukan, Tupoksi dan Susunan Organisasi	6
D. Sistematika Penyusunan Laporan	9
BAB II Perencanaan Kinerja	10
A. Perencanaan Kinerja	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	17
BAB III Akuntabilitas Kinerja	20
A. Capaian Kinerja	20
1. Pengukuran target dan realisasi kinerja tahun 2019	20
2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2019 dengan tahun 2020.....	25
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap target akhir Renstra 2019-2023.....	30
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap target nasional.....	39
5. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja organisasi.....	43
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.....	46
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.....	48
B. Realisasi Anggaran	49
BAB IV Penutup	56

LAMPIRAN

1. Tujuan dan Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023.....	58
2. Formulir RKT Berdasarkan IKU.....	59
3. Rencana Kinerja Tahunan Tingkat SKPD.....	60
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	62
5. Capaian Perjanjian Kinerja.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PDRB Provinsi NTB Tahun 2020 ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010.....	3
Tabel 1.2	Daftar personil Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2020	7
Tabel 2.1	Misi yang harus diimplementasikan Dinas ESDM dalam mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur.....	11
Tabel 2.2	Tujuan dan sasaran Dinas ESDM Tahun 2019-2023	12
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	18
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan 2020	18
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Renstra Dinas ESDM Tahun 2020	22
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2020 berdasarkan Target Renstra 2019-2023	23
Tabel 3.3	Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2020	25
Tabel 3.4	Perbandingan capaian IKK RPJMD 2019-2023 yang mendukung IKU Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2020.....	29
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2020 Terhadap Tahun 2019	27
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2019-2023	32
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra	34
Tabel 3.8	Perkembangan Neraca Daya Listrik Tahun 2018-2020	44
Tabel 3.9	Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2018-2020.....	45
Tabel 3.10	Program/Kegiatan, Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	50
Tabel 3.11	Rekapitulasi Belanja Melalui APBD Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan SKPD.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2016.....	8
Gambar 3.1 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2015-2020	39
Gambar 3.2 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2015-2020	40
Gambar 3.3 Perbandingan Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Terhadap Nasional Tahun 2015-2020	40
Gambar 3.4 Sebaran Capaian Rasio elektrifikasi Nasional Tahun 2020...	41
Gambar 3.5 Kontribusi EBT dalam Pembangkit Listrik Nasional Tahun 2019 dan Perkembangan Kapasitas Pembangkit EBT Nasional 2015-2020 ..	42
Gambar 3.6 Target dan Realisasi Belanja terhadap Capaian IKU 2018-2020	47

RINGKASAN

Dinas ESDM Provinsi NTB sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang ESDM yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Kewenangan tersebut dibagi ke dalam 4 (empat) Sub Urusan Pemerintahan diantaranya Sub Urusan Geologi, Sub Urusan Mineral dan Batubara, Sub Urusan Energi Baru Terbarukan, dan Sub Urusan Ketenagalistrikan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang menjadi tugas Dinas ESDM Provinsi NTB sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh *stakeholder* pelaku pembangunan. Dinas ESDM Provinsi NTB diberikan tugas untuk mendukung pencapaian Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan serta Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (KjIP) Tahun 2020 ini menyajikan informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Selain itu juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan urusan Pemerintahan Bidang ESDM.

Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun kedua dalam periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, dimana Dinas ESDM diberikan amanah untuk melaksanakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Tahun 2020 juga merupakan bagian dari masa-masa yang berat untuk dilalui sebagai akibat adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak triwulan pertama 2020. Namun demikian ditegah pandemi dan keterbatasan anggaran akibat adanya refocusing

Dalam Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani pada tahun 2020 ada 5 (lima) sasaran strategis yang diperjanjikan yaitu :

1. Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat dengan target Rasio elektrifikasi 95,09%.
2. Terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat dari sumber air tanah dengan target jumlah masyarakat yang terlayani air minum sebanyak 765 KK.
3. Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar dengan persentase IUP GMP sebesar 4,00%.

4. Meningkatnya situs geologi sebagai cagar alam geologi dengan Persentase situs geologi yang termanfaatkan sebesar 0%.
5. Meningkatnya peningkatan energi baruterbarukan dengan bauran energi sebesar 14,17%.

Adapun capaian indikator kinerja utama rata-rata berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebesar 77,67% sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1 : Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pendukung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan <i>Good Mining Practices</i> (%)	4,00%	0,87%	21,75%
Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	95,09%	99,98%	105,14%
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air minum dari sumber air tanah (KK)	765 KK	425 KK	55,56%
Meningkatnya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi (situs)	-	-	-
Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (%)	6,62	8,49	128,25%
Rata-rata capaian kinerja				77,67

Selama tahun 2020 Dinas ESDM Provinsi NTB melaksanakan program/kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 13.345.124.455,- telah berupaya meningkatkan terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin berupa listrik dan air bersih melalui lima program prioritas yaitu :

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
- b. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
- c. Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah;
- d. Program pencegahan kerusakan lingkungan;
- e. Program pengembangan dan pemanfaatan energi.

Selain capaian tersebut di atas, Dinas ESDM Provinsi NTB juga mencatat adanya beberapa permasalahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya terkait permasalahan sub urusan pemerintahan bidang mineral dan batubara serta sub urusan pemerintahan bidang geologi,

sub urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan dan sub urusan pemerintahan bidang energi. Keempat permasalahan ini akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas dalam upaya memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi dalam proses perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang ESDM di masa mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih baik dan memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat Provinsi NTB.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam urusan pemerintahan bidang ESDM terdiri dari kewenangan sub urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang geologi, sub urusan bidang energi baru terbarukan dan sub urusan bidang ketenagalistrikan. Sedangkan sub urusan bidang minyak dan gas bumi seluruhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pembentukan Dinas ESDM Provinsi NTB untuk menjawab isu strategis di sektor ESDM yang memerlukan penanganan lebih intensif untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta masih adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah di berbagai sektor. Dinas ESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang ESDM di Provinsi NTB, selain dari tugas tersebut Dinas ESDM juga bertugas untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Sesuai dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 Dinas ESDM diberi tanggungjawab untuk mendukung Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, dan Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Isu strategis terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020 sebagai penjabaran Misi dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin terhadap listrik dan air bersih melalui peningkatan Rasio Elektrifikasi dan cakupan layanan air bersih;
2. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian kegiatan pertambangan dengan memberikan nilai tambah, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan penerapan “*good mining practices*”;
3. Perlindungan terhadap situs geologi dalam rangka pengelolaan geopark;
4. Pemanfaatan potensi energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi dan meningkatkan bauran energi untuk mencapai target rencana umum energi daerah;

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas ESDM telah mengikhtiarkan langkah-langkah untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui program dan kegiatan urusan ESDM.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi, Dinas ESDM Provinsi NTB pada tahun anggaran 2020 telah melaksanakan kebijakan pembangunan bidang ESDM yang berorientasi pada pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan sebagai program unggulan melalui (Nusa Terang Benderang) dengan sasaran terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui listrik. Sasaran tersebut diterjemahkan melalui peningkatan Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi) yang merupakan Indikator Kinerja Kunci berdasarkan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Selain program tersebut juga dilaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah sebagai dukungan untuk meningkatkan capaian air minum yang dilakukan melalui pemanfaatan air tanah.

Peningkatan capaian Rasio Elektrifikasi dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ketenagalistrikan dan memperkuat ketahanan energi daerah melalui pemanfaatan potensi energi baru terbarukan. Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dilaksanakan melalui pemasangan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin yang belum mendapatkan layanan listrik. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah dengan pembangunan sumur bor pada daerah-daerah rawan kekeringan.

Rasio Elektrifikasi adalah rasio antara jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik terhadap jumlah seluruh rumah tangga yang ada yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Dinas ESDM Tahun 2019-2023. Sedangkan peningkatan cakupan air bersih merupakan indikator kinerja pendukung dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah, dimana Dinas ESDM berkontribusi mendukung sasaran kebijakan tersebut bersama SKPD terkait lainnya. Cakupan air bersih merupakan rasio jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih dibandingkan dengan jumlah total penduduk. Besar kontribusi dinyatakan dengan jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapat layanan air bersih pada daerah dimana sumur bor dibangun.

Pada sub urusan pemerintahan bidang mineral dan batubara, pembangunan sektor ESDM diarahkan untuk mampu menghasilkan nilai tambah mineral, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara. Untuk dapat menilai capaian keberhasilan sub bidang urusan mineral dan batubara diterjemahkan dalam satuan persentasi IUP yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (*Good Mining Practices GMP*). Terkait dengan tugas diatas Dinas ESDM Provinsi NTB diberikan tugas untuk mendorong segera direalisasikannya industrialisasi di bidang pertambangan melalui pembangunan *smelter* (pengolahan dan pemurnian logam) di Kabupaten Sumbawa Barat.

Sejak tahun 2000 peran sektor ESDM melalui pertambangan dan pengalihan dalam pembentukan PDRB Provinsi NTB sangat signifikan, hal ini terjadi sejak adanya industri pertambangan mineral logam hingga puncaknya pada tahun 2012. Pasca tahun 2012 hingga saat ini kontribusi sektor pertambangan dan penggalian semakin menurun sejalan dengan menurunnya produksi pertambangan mineral logam dan tren menurunnya harga logam secara global. Dengan segera direalisasikannya industrialisasi usaha pertambangan melalui pembangunan smelter diharapkan dapat meningkatkan peran sektor ESDM dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB. Peran sektor ESDM tahun 2020 dapat dilihat dari PDRB yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. PDRB Provinsi NTB Tahun 2020 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (dalam Juta rupiah)

LAPANGAN USAHA		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
		ADHB	%	ADHB	%	ADHB	%	ADHB	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.974.270,57	21,25	9.026.540,58	27,53	8.150.423,79	23,93	-	-
B	Pertambangan dan Penggalian	5.512.874,56	16,80	5.540.873,48	16,90	5.789.873,82	17,00	-	-
C	Industri Pengolahan	1.093.208,67	3,33	1.220.540,03	3,72	1.721.098,94	5,05	-	-
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27.981,67	0,09	27.111,36	0,08	28.588,65	0,08	-	-
E	Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah	27.627,08	0,08	28.945,77	0,09	28.009,38	0,08	-	-
F	Konstruksi	2.922.677,08	8,91	2.606.869,32	7,95	3.088.603,82	9,07	-	-
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Sepeda Motor dan Mobil	4.812.104,15	14,66	4.749.476,71	14,48	4.796.705,14	14,08	-	-
H	Transportasi dan Pergudangan	2.326.811,49	7,09	1.044.119,55	3,18	1.536.956,03	4,51	-	-
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	657.937,31	2,00	262.015,25	0,80	456.383,58	1,34	-	-
J	Informasi dan Komunikasi	671.067,94	2,04	752.463,15	2,29	754.980,38	2,22	-	-
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.310.897,91	3,99	1.275.574,24	3,89	1.376.067,55	4,04	-	-
L	Real Estate	1.106.768,02	3,37	1.108.614,76	3,38	1.093.959,67	3,21	-	-
M, N	Jasa Perusahaan	65.096,11	0,20	57.689,02	0,18	57.890,14	0,17	-	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.092.769,31	6,38	2.140.766,45	6,53	2.169.013,12	6,37	-	-
P	Jasa Pendidikan	1.751.623,96	5,34	1.684.563,67	5,14	1.683.902,52	4,94	-	-
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	700.699,59	2,14	612.886,08	1,87	651.896,04	1,91	-	-
R, S, T, U	Jasa Lainnya	764.818,92	2,33	651.623,65	1,99	680.431,16	2,00	-	-
	PDRB	32.819.234,34	100,00	32.790.673,08	100,00	34.064.783,74	100,00	-	-

LAPANGAN USAHA		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
		ADHB	%	ADHB	%	ADHB	%	ADHB	%
	PDRB Tanpa Pertambangan Biji Logam	27.306.359,78		27.249.799,60		28.274.909,92		-	-

Keterangan: *) : data sangat sementara Sumber : BPS Provinsi NTB Tahun 2020

Tabel 1.1. menggambarkan bahwa peranan sub sektor pertambangan dan penggalan serta sub sektor Listrik dan air bersih yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM terhadap pembentukan PDRB di Provinsi NTB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 4,91% pada triwulan III tahun 2020 dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2019 dimana sebelumnya 12,09% naik menjadi 17,00%. Sedangkan untuk sub sektor listrik dan gas tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 0,08%. Untuk lapangan usaha pengadaan air dan pengolahan sampah mengalami kenaikan sebesar 0,01% dimana sebelumnya 0,07% pada tahun 2019 menjadi 0,08 pada triwulan III tahun 2020. Hal ini menggambarkan bahwa dalam masa Pandemi Covid-19 sektor pertambangan dan penggalan masih mencatatkan pertumbuhan positif dalam pembentukan PDRB. Secara regional peranan sektor pertambangan dan penggalan dalam masa Pandemi Covid-19 masih dapat bertahan dan bahkan menyumbang pertumbuhan positif secara nasional.

Namun demikian secara keseluruhan peran sektor ESDM melalui sub sektor pertambangan dan penggalan serta sub sektor air bersih untuk tahun 2020 berada di posisi kedua dibawah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Peranan sub sektor pertambangan dan penggalan mempunyai peranan sebesar 18,63% pada tahun 2012; 17,49% tahun 2013; 14,39% tahun 2014; 19,07% tahun 2015; 22,18% tahun 2016; 19,45% tahun 2017; 11,68% tahun 2018; 13,56% tahun 2019 dan 17,00% (s/d triwulan III 2020). Sedangkan sub sektor listrik dan gas peranannya masih sangat kecil yaitu sebesar 0,51% pada tahun 2012; 0,52% tahun 2013; 0,59% tahun 2014; 0,15% tahun 2015; 0,16% tahun 2016; 0,16% tahun 2017; 0,15% Tahun 2018; 0,07% tahun 2019 dan 0,08% (s/d triwulan III 2020) [www.ntb.bps.go.id].

Sektor ESDM mempunyai peluang yang baik untuk berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi NTB, mengingat potensi ESDM yang dimiliki daerah ini relatif besar, khususnya komoditi tambang mineral dengan menjadi daerah penghasil produk mineral di Indonesia. Pada sub urusan pemerintahan bidang energi baru terbarukan dan sub urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan, Provinsi NTB memiliki potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi listrik diantaranya panas bumi, energi air, energi angin dan terutama energi matahari. Untuk itu kedepan potensi tersebut diharapkan dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB.

B. Landasan Operasional

Dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang merupakan produk hukum Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sesuai herarki. Hal ini dimaksudkan agar segala bentuk pelaksanaan program dan kegiatannya memiliki landasan hukum yang jelas untuk menghindari berbagai hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
17. Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB;
18. Peraturan Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas - Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi NTB.

C. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Melalui Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan pembentukan Perangkat Daerah yang salah satu Dinas yang dibentuk adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan Pasal 5 huruf (u) Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disebutkan bahwa: “Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral”. Selanjutnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Lebih lanjut disebutkan dalam Lampiran II, Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi NTB, menyebutkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral.

2. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- c. Pengendalian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2020 didukung oleh 76 personil, yang terdiri dari 11 orang golongan IV, 43 orang golongan III dan 22 orang golongan II. Berdasarkan pendidikan terdiri dari 12 orang pasca sarjana (S2), 34 orang sarjana (S1/D4), 27 orang berpendidikan SLTA, dan 3 orang berpendidikan SLTP, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2. Daftar personil Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2020.

URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH	PANGKAT/ GOLONGAN			
	S2	S1	D4	SLTA	SLTP	SD		IV	III	II	I
Eselon II	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Eselon III	2	3	0	0	0	0	5	5	0	0	0
Eselon IV	8	8	0	0	0	0	16	2	14	0	0
Fungsional Tertentu	0	3	0	0	0	0	3	1	2	0	0
Fungsional Umum	1	19	1	27	3	0	51	2	27	22	0
JUMLAH	12	33	1	27	3	0	76	11	43	22	0

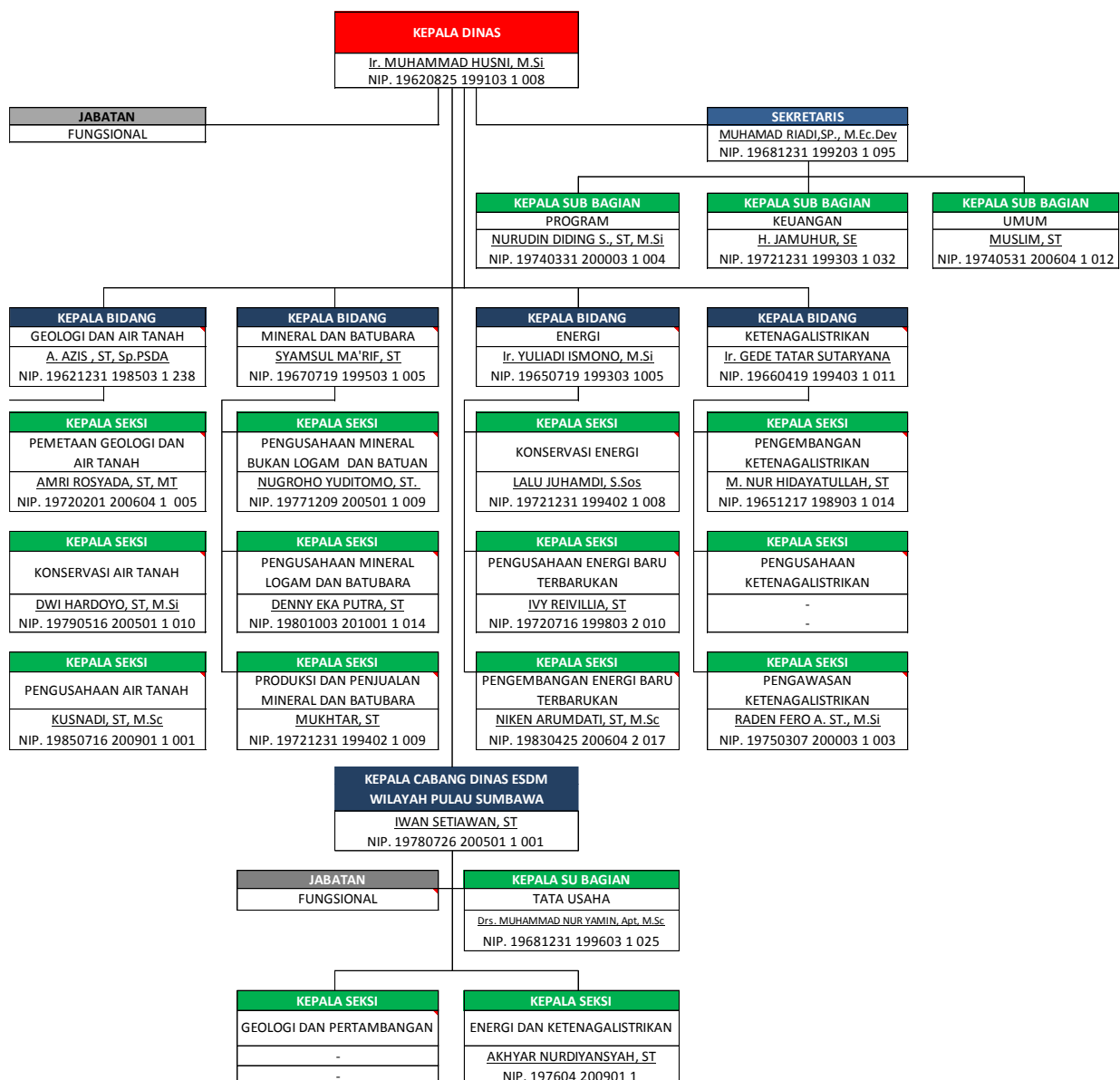
Sumber Data : Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2020

Susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB serta Pergub Nomor 50 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri dari:
 - Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
 - Seksi Pengusahaan Air Tanah;
 - Seksi Konservasi Air Tanah.
- d. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri dari:
 - Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara;
 - Seksi Produksi, Penjualan Mineral dan Batubara.
- e. Bidang Energi, terdiri dari:
 - Seksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
 - Seksi Pengusahaan Energi Baru Terbarukan;
 - Seksi Konservasi Energi.
- f. Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari:
 - Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
 - Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.

- g. Cabang Dinas;
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa
- Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Geologi dan Pertambangan;
 - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Jabatan fungsional Surveyor Pemetaan;
 - Jabatan fungsional Perencana;
 - Jabatan fungsional Arsiparis.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, sesuai Perda 11 tahun 2016, tanggal 15 Desember 2016 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran
Daftar Tabel/Grafik
Daftar Gambar
Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Operasional
- C. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
- D. Sitematika Penyusunan Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Bab III Akuntabili tas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Pengukuran target dan realisasi kinerja tahun 2020
 - 2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2019 dengan tahun 2020
 - 3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 terhadap target akhir Renstra 2019-2023
 - 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 terhadap target nasional
 - 5. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja organisasi
 - 6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

- 1. Rencana Strategis SKPD
- 2. Indikator Kinerja Utama SKPD
- 3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
- 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- 5. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja SKPD Tahun 2020
- 6. Laporan Pendukung LAKIP Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan bersamaam dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dinas ESDM Provinsi NTB telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dinas ESDM Provinsi NTB mendukung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Misi 4 dan Misi 5 dengan sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2020 terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis yang diperjanjikan yaitu : Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat melalui peningkatan Rasio elektrifikasi; terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat dari sumber air tanah melalui penambahan jumlah KK yang mendapatkan air minum; Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar; Meningkatnya situs geologi sebagai cagar alam geologi; dan Meningkatnya peningkatan energi baru terbarukan melalui bauran energi.

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana strategis Pemerintah Provinsi NTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023 berfungsi sebagai pedoman Gubernur beserta perangkatnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja

tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahun. RPJMD juga memuat strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian target sasaran dalam rencana pembangunan.

Selanjutnya sebagai penjabaran RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dibidangnya. Sebagai Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur melaksanakan kewenangannya dalam urusan bidang energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM telah menyusun Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Merujuk pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 bahwa sasaran dalam RPJMD menjadi Tujuan Dinas ESDM Provinsi NTB. Untuk itu tujuan Dinas ESDM Provinsi NTB adalah “terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin” khususnya terkait dengan akses penduduk terhadap listrik. Adapun indikator kinerja kunci (IKK) tujuan tersebut adalah Rasio Elektrifikasi (%). Terdapat 2 Misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang harus dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB misi tersebut terdiri dari Misi 4 dan Misi 5 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.1. Misi yang harus diimplementasikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatnya fungsi ekologi lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Mengoptimalkan pengelolaan geopark	Persentase Geosite yang tertata
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Angka Kemiskinan	Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi

Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTB Periode 2019-2023 sebagai Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya pemanfaatan pertambangan mineral dan batubara secara efektif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan <i>Good Mining Practices</i> (%)	2.17	4.00	6.60	7.20	8.00
2	Terwujudnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	94.46	95.09	95.72	96.35	97.00
3	Terwujudnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih	Cakupan masyarakat yang dapat akses air tanah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air minum dari sumber air tanah (KK)	2040	255	255	255	425
4	Terwujudnya perlindungan kawasan yang memiliki keanekaragaman geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi	Meningkatnya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi (situs)	3	3	3	3	3
5	Terwujudnya peningkatan Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi	Kontribusi Energi Baru Terbarukan terhadap total bauran energi (%)	Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (%)	5.50	6.62	5.96	5.64	5.57

Dari tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat 5 (lima) tujuan yang akan dicapai oleh Dinas ESDM Provinsi NTB terkait dengan pelayanan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun 2019-2023. Kelima tujuan tersebut masing-masing mempunyai satu sasaran dengan satu indikator. Adapun kelima tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan terwujudnya pemanfaatan pertambangan mineral dan batubara secara efektif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan indikator tujuan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Adapun sasarannya adalah meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar dengan indikator berupa persentase pemegang IUP yang melaksanakan *Good Mining Practices* (%).
2. Tujuan terwujudnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan listrik dengan indikator tujuan berupa Rasio elektrifikasi. Adapun sasarannya adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik dengan indikator sasaran Rasio Elektrifikasi dalam satuan (%). Rasio elektrifikasi diartikan sebagai jumlah rumah tangga yang telah menikmati listrik terhadap jumlah keseluruhan rumah tangga. Pembangunan infrastruktur kedepan masih memprioritaskan pembangunan fasilitas pemanfaatan tenaga listrik untuk masyarakat kurang mampu, baik di wilayah yang sudah dilalui jaringan listrik PLN maupun yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN.

3. Tujuan terwujudnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air minum dengan indikator tujuan berupa jumlah masyarakat yang terlayani air bersih dalam satuan kepala keluarga (KK). Adapun sasarannya adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih yang bersumber dari air tanah dengan indikator tujuan berupa jumlah masyarakat yang terlayani air minum yang bersumber dari air tanah. Sumber pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih berasal dari dua sumber yaitu air permukaan dan air tanah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih yang bersumber dari air tanah sesuai kewenangan yang dimiliki terutama bagi daerah-daerah rawan kekeringan dan/atau daerah-daerah yang memiliki kondisi geologi yang menyulitkan masyarakat untuk memperoleh air bersih yang bersumber dari air tanah.
4. Tujuan terwujudnya perlindungan kawasan yang memiliki keanekaragaman geologi dengan indikator jumlah kawasan lindung geologi yang dilindungi. Sasaran dari tujuan ini adalah termanaftkannya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi dengan indikator jumlah situs geologi yang dilindungi. Tujuan pengelolaan kawasan lindung geologi ini terkait dengan Program Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023, dimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berkontribusi terhadap pengembangan Geowisata yang memanfaatkan keanekaragaman geologi melalui *Geopark Rinjani* dan *Geopark Tambora*.
5. Tujuan terwujudnya peningkatan energi baru terbarukan dalam bauran energi dengan indikator kontribusi energi baru terbarukan terhadap total bauran energi. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan dengan indikator kontribusi pembangkit listrik energi baru terbarukan. Tujuan pemanfaatan energi baru terbarukan ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung terpenuhinya capaian bauran energi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah Provinsi NTB sebesar 23% pada tahun 2025.

Sesuai dengan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 untuk mengoptimalkan kinerja organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB pada tahun anggaran 2020 telah menjalankan arah pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang berorientasi pada terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui listrik dan air bersih dengan melaksanakan 11 program dengan 40 kegiatan sebagai berikut:

1. ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas administrasi dan tersedianya layanan ketatalaksanaan bidang ESDM dalam pelayanan publik, dengan indikator sasaran tersedianya sarana pendukung dan jasa penunjang operasional administrasi dan ketatalaksanaan rumah tangga Perangkat Daerah. Sasaran diharapkan terealisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa surat menyurat dengan target 1.700 surat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dengan target 3 jenis;
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 3 jenis;
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan target 12 orang;
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan target 7 orang;
 - f. Penyediaan alat tulis kantor dengan target 17 jenis;
 - g. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan dengan target 10 jenis;
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target 8 jenis;
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan target 2 jenis; dan
 - j. Penyelarasan program Pemerintah Pusat dan Daerah dengan target 1 tahun;
 - k. Penyelarasan program pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan target 1 tahun.
2. ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***, bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur. Indikator sasaran adalah tersedianya dan terpeliharanya peralatan penunjang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sasarannya diharapkan teralisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Pengadaan UPS / Stabilizer, Komputer dan Alat-alat Elektronik, dengan target indikator kinerja tersedianya 13 unit peralatan penunjang kerja kantor;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan indikator kinerja berfungsinya gedung kantor dinas, bidang dan balai secara optimal sementara tidak ada target disebabkan adanya refokusing anggaran;
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan indikator kinerja berfungsinya secara optimal 22 unit sarana transportasi kantor;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala 30 unit Peralatan Kantor, dengan indikator kinerja berfungsinya peralatan dan fasilitas kerja kantor.
3. ***Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur***, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparat di bidang energi dan sumberdaya mineral. Indikator sasaran adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan, pembinaan mental, fisik dan disiplin bagi aparatur sehingga tercapai peningkatan kinerja aparatur. Sasaran diharapkan terealisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur, dengan indikator Terwujudnya 92 aparatur yang tangguh secara mental dan fisik;
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan pelatihan berdasarkan kompetensi untuk jabatan teknis tertentu dan jabatan fungsional untuk satu orang.

4. ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan perencanaan urusan ESDM. Indikator sasaran adalah terwujudnya laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja dan Anggaran yang akuntabel, serta dokumen perencanaan yang berkualitas. Sasaran diharapkan terealisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan indikator kinerja dilaksanakannya evaluasi pencapaian kinerja kepala SKPD berdasarkan penetapan kinerja sebanyak satu dokumen;
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun, dengan indikator kinerja tersedianya satu dokumen penyerapan dan realisasi anggaran;
 - c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD, dengan indikator kinerja tersedianya 3 dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan agenda kebijakan daerah. Dokumen tersebut terdiri dari Rencana Kerja SKPD Tahun 2020, Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2020, Rencana Kegiatan dan Anggaran 2021 serta Dokumen SAKIP 2020.
5. ***Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah***, bertujuan untuk meningkatkan kualitas penatausahaan dan tertibnya pengelolaan aset Barang milik Daerah (BMD), dengan indikator sasaran tersedianya satu dokumen Laporan Aset BMN/BMD. Sasaran ini diharapkan terealisasi 100%;
6. ***Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan***, bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) dengan indikator sasaran tersedianya arahan kebijakan perusahaan pertambangan dan tertib administrasi perizinan di Provinsi NTB, terlaksananya pengawasan usaha pertambangan dan bimbingan bagi pelaku tambang mandiri. Sasaran ini diharapkan terealisasi 4,00% pemegang IUP melaksanakan *good mining practice*, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pendataan hasil produksi dibidang pertambangan, dengan indikator jumlah IUP/IPR yang didata hasil produksinyasebanyak 45 IUP/IPR;
 - b. Pengawasan usaha pertambangan, dengan indikator jumlah IUP/IPR yang diawasi sebanyak 45 IUP/IPR;
 - c. Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral logam dengan indikator kinerja jumlah perizinan pertambangan mineral logam yang diterbitkan 9 izin;
 - d. Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan indikator kinerja jumlah perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan 102 izin;.
7. ***Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan***, bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan energi yang memadai beberapa tahun kedepan melalui kegiatan:
 - a. Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan, dengan indikator jumlah perizinan ketenagalistrikan yang diterbitkan 30 izin.

- b. Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan, dengan indikator jumlah rumah tangga yang dipaang listrik murah dan hemat 1.255 RTS;
 - c. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan dengan indikator jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang dibina dan diawasi 30 izin.
8. ***Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah***, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan cakupan air bersih melalui pemanfaatan air tanah dan pengendalian pemanfaatan air tanah dan konservasi air tanah melalui kegiatan :
 - a. Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah dengan indikator jumlah rencana teknis pemanfaatan air tanah sebanyak 14 buah;
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah dengan indikator jumlah sumur bor yang dibangun sebanyak 9 unit.
 - c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah dengan indikator jumlah perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan sebanyak 60 izin;
 - d. Konservasi air tanah dengan indikator jumlah zona konservasi air tanah yang direview 3 zona.
9. ***Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral***, dengan sasaran untuk meningkatkan keselarasan perencanaan ESDM. Sasaran ini diharapkan bisa terealisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, dengan indikator capaian tersedianya 1 dokumen usulan perencanaan Program/Kegiatan SKPD guna terwujudnya sinergi perencanaan dan implementasi program dan kegiatan bidang pertambangan dan energi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Pendataan Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, dengan indikator capaian tersedianya data dan informasi sektor energi dan sumber daya mineral yang tervalidasi dari waktu ke waktu yang dipublikasi melalui *web* dinas satu dokumen;
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, dengan indikator capaian tersusunnya 3 dokumen laporan bulanan, triwulan dan tahunan SKPD sebagai hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Energi dan Sumber daya Mineral baik internal maupun eksternal.
10. ***Program pencegahan kerusakan lingkungan***, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlindungan kawasan geologidengan indikator kinerja berupa jumlah situs geologi yang dilindungi pada tahun 2020 ini sebanyak 3 situs geologi yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Mitigasi Rawan Bencana Alam Geologi, dengan indikator jumlah orang yang memahami bencana alam geologi dimana sebelumnya ditargetkan 500 orang namun karena adanya refokusing anggaran berubah target menjadi 0 orang.

- b. Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi, dengan indikator jumlah orang yang memahami keanekaragaman geologi dimana sebelumnya ditargetkan 500 orang namun karena adanya refokusing anggaran berubah target menjadi 0 orang.
11. **Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi**, bertujuan meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam penggunaan energi, dengan indikator kinerja kontribusi pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan dengan target pada tahun 2020 sebesar 6,62%. Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan yang terdiri dari :
- a. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan energi baru terbarukan, dengan indikator kinerja jumlah pengelola pembangkit energi baru terbarukan yang dibina sebanyak 4 perusahaan.
 - b. Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, dengan indikator Jumlah sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan pada tahun 2020 sebanyak 44 unit.
 - c. Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi, dengan indikator jumlah peserta penyuluhan bidang energi dimana sebelumnya ditargetkan 100 orang namun karena adanya refokusing anggaran berubah target menjadi 0 orang.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam menyusun perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Dinas ESDM Provinsi NTB pada tahun 2020 telah menyusun perjanjian kinerja pada awal tahun antara Kepala Dinas sebagai pihak pertama dan

Gubernur sebagai pihak kedua dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra Dinas. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kepala Dinas. Kemudian Gubernur sebagai pemberi tugas akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2020 yang mendasarkan pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan diturunkan ke dalam Renstra Dinas ESDM Tahun 2019-2023. Terdapat dua sasaran strategis yang masuk dalam perjanjian kinerja tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan <i>Good Mining Practices</i> (%)	95,09%
Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	765 KK
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air minum dari sumber air tanah (KK)	4,00%
Meningkatnya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi (situs)	- *)
Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (%)	6,62%

*) Adanya refocusing anggaran

Adapun Rencana Kinerja yang dilaksanakan di tahun 2020 untuk mendukung Perjanjian/Penetapan Kinerja (PK) tahun 2020 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah	1 Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	0,87%
		a. Jumlah IUP/IPR yang didata produksinya	45 Izin
		b. Jumlah IUP/IPR yang diawasi	45 Izin

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pertambangan yang baik dan benar	c. Jumlah perizinan pertambangan mineral logam yang diterbitkan	9 Izin
		d. Jumlah perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan	102 Izin
2	Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat	2 Rasio Elektrifikasi	95,09%
		a. Jumlah perizinan ketenagalistrikan yang diterbitkan	30 Izin
		b. Jumlah Rumah Tangga yang dipasang listrik murah dan hemat	1.255 RTS
		c. Jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang dibina dan diawasi	30 Izin
3	Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan yang bersumber dari air tanah	3 Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih	765 KK
		a. Jumlah rencana teknis pemanfaatan air tanah	14 Buah
		b. Jumlah sumur bor yang dibangun	9 Unit
		c. Jumlah perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan	25 Izin
		d. Jumlah zona konservasi air tanah yang direview	3 Zona
4	Tersedianya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	4 Jumlah situs geologi yang dilindungi	3 Situs
		a. Jumlah orang yang memahami bencana alam geologi	-
		b. Jumlah orang yang memahami keanekaragaman geologi	-
5	Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	5 Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan	6,62%
		a. Jumlah pengelola pembangkit energi baru terbarukan yang terbina.	4 Buah
		b. Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan	44 Buah
		c. Jumlah peserta penyuluhan bidang energi	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

1. Pengukuran target dan realisasi kinerja tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Terdapat lima sasaran strategis yaitu terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan kinerjanya pada tahun 2020 oleh Dinas ESDM Provinsi NTB yaitu :

- a. Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar dengan indikator kinerja Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan *Good Mining Practices* (%).
- b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik dengan indikator kinerja Rasio Elektrifikasi (Cakupan Listrik).
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dengan indikator kinerja terpenuhinya kebutuhan air bersih yang memadai (jumlah KK yang terlayani air bersih).
- d. Meningkatnya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi dengan indikator kinerja jumlah situs geologi yang dilindungi.

- e. Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan dengan indikator kinerja Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (%).

Adapaun pengukuran target dan realisasi kinerja setiap sasaran strategis tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar dengan indikator kinerja Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan *Good Mining Practices* (%) dengan target 4 % namun realisasinya hanya tercapai 0,87% disebabkan berkurangnya dukungan anggaran dan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Sasaran Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik dengan indikator kinerja Rasio Elektrifikasi (Cakupan Listrik).

Target rasio elektrifikasi pada tahun 2020 yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB sebesar 95,09%, penentuan target tersebut telah memperhatikan perkembangan realisasi rasio elektrifikasi beberapa tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan sektor kelistrikan di Provinsi NTB lima tahun terakhir. Realisasi rasio elektrifikasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 99,98%, realisasi tersebut melebihi 4,89% dari target tahun 2020 dengan capaian target rasio elektrifikasi 105,14%. Capaian realisasi ini didukung oleh peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan distribusi yang dibangun oleh PLN melalui program nasional pembangunan pembangkit dan jaringan 35.000 MW. Untuk mendukung peningkatan rasio elektrifikasi Dinas ESDM Provinsi NTB telah melaksanakan Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan Program pengembangan dan pemanfaatan energi yang hajatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi 1.255 RTS (Rumah tangga Sasaran) masyarakat miskin melalui pemasangan listrik murah dan hemat.

- c. Sasaran mendukung meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dengan indikator kinerja terpenuhinya kebutuhan air bersih yang memadai (jumlah KK yang terlayani air bersih).

Target penambahan terpenuhinya kebutuhan air bersih pada tahun 2020 sebesar 765 KK melalui Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah dan Program pencegahan kerusakan lingkungan. Program tersebut dilaksanakan melalui pembangunan 9 titik sumur bor. Realisasi tahun 2020 sebesar 425 KK atau lebih kecil 340 KK dari target 2020 yaitu sebesar 765 KK. Realisasi tersebut dihasilkan dari pembangunan 5 titik sumur bor. Capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan air bersih yang memadai sebesar 55,56%. Pembangunan sumur bor tidak mencapai

target sebesar 9 unit sumur bor dikarenakan adanya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 900/1280/BPKAD/200 tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Belanja Daerah berdasarkan Ketersediaan Surat Penyediaan Dana (SPD), dimana SPD untuk pembangunan 4 sumur bor tidak terbit karena tidak tersedianya dana. Dinas ESDM Provinsi NTB dalam hal ini mendukung terwujudnya cakupan air bersih yang menjadi kinerja utamanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB.

- d. Sasaran yang mendukung meningkatnya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi dengan indikator kinerja jumlah situs geologi yang dilindungi. Sebelumnya target pada tahun 2020 setidaknya ada 3 situs geologi yang dilindungi, namun demikian, adanya refokusing anggaran menjadikan target tersebut tidak dapat direalisasikan.
- e. Sasaran yang mendukung meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan (EBT) dengan indikator kinerja kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (%). Target peningkatan kontribusi EBT dalam pembangkit listrik pada tahun 2020 sebesar 6,62% dengan realisasi sebesar 8,49%. Tingginya realisasi peningkatan kontribusi energi baru terbarukan ini banyak didukung oleh kinerja PLN baik melalui pembangunan pembangkit EBT yang bersumber dari anggaran PLN maupun yang bersumber dari *Independent Power Producer* (IPP) swasta.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis tahun 2020 disajikan dalam Pengukuran Kinerja pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Dalam Renstra Dinas ESDM Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan <i>Good Mining Practices</i> (%)	4,00%	0,87%	21,75%
Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	95,09%	99,98%	105,14
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air minum dari sumber air tanah (KK)	765 KK	425 KK	55,56
Meningkatnya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi (situs)	-	-	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (%)	6,62	8,49	128,25%
Rata-rata capaian kinerja				77,67

Adapun penjelasan capaian kinerja sasaran Renstra berdasarkan target kinerja yang Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2020 disajikan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2020, berdasarkan target dalam Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)
				Satuan	Volume		
1.	Terwujudnya peningkatan cakupan layanan listrik	17. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	95.09	99.98	105.14
		17.02 Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah perizinan ketenagalistrikan yang diterbitkan	Izin	30	28	93.33
		17.03 Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Rumah Tangga yang dipasang listrik murah dan hemat	RTS	1.255	1.255	100.00
		17.04 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang dibina dan diawasi	Izin	30	28	93.33
		24. Program Pengembangan dan pemanfaatan energi	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan	%	6.62	8.49	128.25
		24.01 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah pengelola pembangkit energi baru terbarukan yang terbina.	Buah	4	5	125.00
		24.02 Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan	Unit	44	44	100.00
		24.03 Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	Jumlah peserta penyuluhan bidang energi	Orang	-	-	-
		15. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	%	0.87	0.87	100

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)
				Satuan	Volume		
		15.04 Pendataan Hasil Produksi dibidang Pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang didata produksinya	Jumlah IUP/IPR	45	66	146.67
		15.10 Pengawasan usaha pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang diawasi	Jumlah IUP/IPR	45	21	46.67
		15.12 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Logam	Jumlah perizinan pertambangan mineral logam yang diterbitkan	Izin	9	21	223.33
		15.13 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan	Izin	102	182	178.43
2.	Mendukung terwujudnya peningkatan cakupan air bersih	18. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih	KK	765	425	55.56
		18.01 Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah rencana teknis pemanfaatan air tanah	Buah	14	14	100.00
		18.02 Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah sumur bor yang dibangun	Unit	9	5	55.56
		18.03 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Jumlah perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan	Izin	60	126	210
		18.04 Konservasi Air Tanah	Jumlah zona konservasi air tanah yang direview	Zona	3	3	100.00
		22. Program pencegahan kerusakan lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi	Situs	3	-	-
		22.01 Mitigasi rawan bencana alam geologi	Jumlah orang yang memahami bencana alam geologi	Orang	-	-	-
		22.02 Pengelolaan kawasan lindung geologi	Jumlah orang yang memahami keanekaragaman geologi	Orang	-	-	-
Rata-rata capaian program							77.31
Rata-rata capaian kegiatan							98.27

Berdasarkan perhitungan target dan realisasi kinerja tahun 2020 maka dapat dilihat bahwa capaian kinerja program sebesar 77,31% dan capaian kinerja kegiatan sebesar 98,27%. Capaian tersebut didapat dengan membandingkan capaian masing-masing sasaran yang terdapat dalam program maupun kegiatan terhadap target pada tahun 2020 sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2020.

Capaian kinerja program tertinggi terdapat pada sasaran strategis meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan dengan capaian sebesar 128,25%. Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang baik, dimana peningkatan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan terus meningkat dari tahun-ketahun mengikuti

kebijakan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM dan PLN. Peningkatan capaian tersebut dihitung dari jumlah kapasitas daya terpasang PLN sebesar 480,72 MW dimana 41,04 MW bersumber dari energi baru terbarukan.

Realisasi Rasio Elektrifikasi tahun 2020 sebesar 99,98% dari target pada tahun 2020 sebesar 95,09% atau capaiannya sebesar 105,14%. Capaian tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu berupa kinerja Pemerintah Pusat melalui program pembangunan pembangkit dan jaringan listrik 35.000 MW sertapartipasi masyarakat melalui pemasangan listrik secara mandiri sehingga meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan listrik yang berdampak pada meningkatnya Rasio Elektrifikasi. Berikut ini capaian rasio elektrifikasi Provinsi NTB sampai dengan akhir tahun 2020 :

Tabel 3.3 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2020

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	RUMAH TANGGA PROVINSI/ KAB/KOTA	RUMAH TANGGA BERLISTRIK			RE NTB (%)	RE PLN (%)
			PLN	LTSHE (2017 dan 2019)	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6/3*100	8=4/3*100
	PROVINSI NTB	1.492.981	1.490.004	2.709	1.492.713	99,98	99,80
1	Kota Mataram	143.601	134.977	0	134.977	93,99	93,99
2	Kab. Lombok Barat	206.686	217.409	321	217.730	100,00	100,00
3	Kab. Lombok Tengah	295.321	297.676	50	297.726	100,00	100,00
4	Kab. Lombok Timur	364.120	362.594	536	363.130	99,73	99,58
5	Kab. Lombok Utara	70.950	71.089	537	71.626	100,00	100,00
6	Kab. Sumbawa	132.247	133.892	657	134.549	100,00	100,00
7	Kab. Sumbawa Barat	40.000	37.155	0	37.155	92,89	92,89
8	Kota Bima	42.025	42.141	0	42.141	100,00	100,00
9	Kab. Bima	125.797	122.051	340	122.391	97,29	97,02
10	Kab. Dompu	72.234	71.020	268	71.288	98,69	98,32

Sumber : Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2020 (diolah bersama data PLN).

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2019 dengan tahun 2020

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2019 dengan tahun 2020 berdasarkan setiap sasaran strategis yang diperjanjikan pada tahun yang bersangkutan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar dengan indikator kinerja Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan *Good Mining Practices* (%) dengan target 4 % namun realisasinya hanya tercapai 0,87% disebabkan berkurangnya dukungan anggaran dan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Capaian realisasi pada tahun 2019 dari target 2,17% dengan realisasi 2,17% atau tercapai 100%. Capaian pada tahun 2019 dapat terealisasi disebabkan masih adanya kewenangan Provinsi dalam pengelolaan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

- b. Sasaran terwujudnya peningkatan cakupan layanan listrik dengan indikator kinerja Rasio Elektrifikasi (Cakupan Listrik).

Pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 salah satu indikator kinerja utama dari 31 indikator kinerja utama yang ditetapkan adalah Rasio Elektrifikasi. Rasio elektrifikasi masuk dalam salah satu indikator kinerja utama dalam Misi 5 yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat penurunan kemiskinan dan mengembangkan keunggulan daerah dengan salah satu saarannya tersedianya sarana dan prasarana wilayah yang seimbang/proporsional. Target rasio elektrifikasi pada akhir masa RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 sebesar 75,00%. Realisasi rasio elektrifikasi pada tahun 2018 sebesar 93,83% dengan capaian sebesar 125,11%. Namun demikian sejalan dengan adanya perubahan kepemimpinan dan visi, misi dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, rasio elektrifikasi sudah tidak menjadi indikator kinerja utama lagi. Dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 Rasio elektrifikasi merupakan salah satu indikator sasaran (IKK) yang masuk dalam misi 5 NTB Sejahtera dan mandiri dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimana salah satu saarannya adalah terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan salah satu indikatornya Rasio Elektrifikasi. Jika dibandingkan realisasi dan capaian rasio elektrifikasi tahun 2019 dan tahun 2020 maka tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2019. Capaian rasio elektrifikasi tahun 2019 sebesar 105,39% yang dihasilkan dari realisasi rasio elektrifikasi 99,55% dari target sebesar 94,06%. Sedangkan Capaian rasio elektrifikasi tahun 2020 sebesar 105,14% yang dihasilkan dari realisasi rasio elektrifikasi sebesar 99,98% dari target sebesar 95,09%.

Capaian realisasi rasio elektrifikasi tahun 2019 dan tahun 2020 ini pada dasarnya didukung oleh faktor yang sama yaitu peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan distribusi yang dibangun oleh PLN melalui program nasional pembangunan pembangkit dan jaringan 35.000 MW dan partisipasi masyarakat untuk memasang listrik secara mandiri. Untuk mendukung peningkatan rasio elektrifikasi Dinas ESDM Provinsi NTB telah melaksanakan Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan Program pengembangan dan pemanfaatan energi yang hajatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin melalui pemasangan listrik murah dan hemat dengan jumlah 950 RTS pada tahun 2019 dan 1.255 RTS pada tahun 2020.

- c. Sasaran mendukung terwujudnya peningkatan cakupan air bersih dengan indikator kinerja terpenuhinya kebutuhan air bersih yang memadai (jumlah KK yang terlayani air bersih).

Hampir sama dengan Indikator Kinerja Utama Rasio Elektrifikasi, dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2019 melalui misi ke 5 meningkatkan

kesejahteraan dan mempercepat penurunan kemiskinan dan mengembangkan keunggulan daerah salah satu indikator kinerjanya adalah cakupan air bersih yang terbagi menjadi air bersih perkotaan dan air bersih perdesaan. Dinas ESDM Provinsi NTB pada tahun 2019 telah menargetkan dapat berkontribusi terhadap cakupan air bersih perdesaan sebesar 2.040 KK melalui pembangunan 24 titik sumur bor, realisasinya sebesar 2.125 KK dengan capaian 104,17%. Pada tahun 2019 terdapat perubahan kepemimpinan dan visi, misi RPJMD, dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 cakupan air bersih berubah menjadi cakupan air minum yang masuk dalam salah satu indikator sasaran (IKK) yang masuk dalam misi 5 NTB Sejahtera dan Mandiri dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan sasaran terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dimana salah satu indikator saarannya adalah cakupan air minum. Jika dibandingkan capaian cakupan air minum pada tahun 2019 dan tahun 2020 maka terjadi penurunan. Dimana capaian pada tahun 2020 sebesar 55,56% yang dihasilkan dari realisasi 425 KK dari target pada tahun 2020 sebesar 765 KK. Realisasi tersebut dilaksanakan melalui Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah dan Program pencegahan kerusakan lingkungan. Program tersebut dilaksanakan melalui pembangunan 5 titik sumur bor dari 9 titik bor yang direncanakan. Dinas ESDM Provinsi NTB dalam hal ini mendukung terwujudnya cakupan air minum yang menjadi kinerja utamanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB.

- d. Sasaran yang mendukung meningkatnya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi dengan indikator kinerja jumlah situs geologi yang dilindungi pada tahun 2020 dengan adanya refokusing anggaran menjadikannya tidak ada target capaian. Berbeda dengan tahun 2019 dari target sebanyak 3 situs dapat direalisasikan sebanyak 7 situs dengan capaian 233,33% melalui peningkatan efisiensi dalam pelaksanaannya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan situs geologi sebagai cagar alam diantaranya dengan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat sekitar keberadaan situs geologi akan pentingnya menjaga kelestarian dan fungsi situs geologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kunjungan wisata.
- e. Sasaran yang mendukung meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan (EBT) dengan indikator kinerja kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (%). Target peningkatan kontribusi EBT dalam pembangkit listrik pada tahun 2020 sebesar 6,62% dengan realisasi sebesar 8,49% dengan capaian sebesar 128,25%. Dibandingkan dengan tahun 2019 dengan target 5,5% dengan realisasi 7,35% dengan capaian 133,64%, maka ada penurunan capaian sebesar 5,39%. Namun demikian kinerja tahun 2019 dan tahun 2020 masih melampaui target yang ditetapkan pada masing-

masing tahun. Tingginya realisasi peningkatan kontribusi energi baru terbarukan ini banyak didukung oleh kinerja PLN baik melalui pembangunan pembangkit EBT yang bersumber dari anggaran PLN maupun yang bersumber dari *Independent Power Producer* (IPP) swasta. Peningkatan kapasitas pembangkit EBT oleh PLN maupun IPP dengan memanfaatkan potensi energi fotovoltaik atau matahari, energi angin atau bayu dan energi air baik melalui mikrohydro maupun minihydro.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2019 dengan tahun 2020 disajikan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKK) RPJMD Tahun 2019-2023 yang mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2019 dengan tahun 2020.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan <i>Good Mining Practices</i> (%)	2,17%	2,17%	100,00	4,00%	0,87%	21,75
Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	95,09%	99,98%	105,14	95,09%	99,98%	105,14
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air minum dari sumber air tanah (KK)	2.040 KK	2.125 KK	104,17	765 KK	425 KK	55,56
Meningkatnya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi (situs)	3	7	233,33	-	-	-
Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (%)	5,5	7,35	133,64	6,62	8,49	128,25
Rata-rata capaian kinerja				135,26	77,67		

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2019 dengan tahun 2020 terdapat penurunan rata-rata capaian sebesar 27,11% dimana pada tahun 2019 rata-rata capaian sebesar sebesar 104,78% dan rata-rata capaian dimana pada tahun 2020 sebesar 77,67%. Penurunan secara signifikan terjadi pada capaian indikator kinerja Jumlah KK yang terlayani air bersih yang pada tahun 2019 capaiannya sebesar 104,17% turun sebanyak 48,61% menjadi sebesar 55,56% pada tahun 2020. Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan oleh tidak terlaksananya pembangunan 4 unit sumur bor sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya disebabkan oleh tidak tersediannya anggaran yang ditandai dengan tidak terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk kegiatan tersebut dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Nomor : 900/1280/BPKAD/2021 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Pelaksanaan Belanja Daerah Berdasarkan Ketersediaan Surat Penyediaan dana (SPD).

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2020 terhadap Tahun 2019

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		% Capaian	
				2019	2020	2019	2020	Terhadap 2019	Terhadap Target 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5*100%	10=8/6*100%
Meningkat-nya usaha pertambang-an yang sesuai dengan kaidah pertambang-an yang baik dan benar	15. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan <i>Good Mining Practices</i>	%	2.17	4.00	2.17	0.87	100.00	21.75
	15.04 Pendataan Hasil Produksi dibidang Pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang didata produksinya	Jumlah IUP/IPR	40	45	46	66	115.00	146.67
	15.10 Pengawasan usaha pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang diawasi	Jumlah IUP/IPR	27	45	35	21	129.63	46.67
	15.12 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Logam	Jumlah perizinan pertambangan mineral logam yang diterbitkan	Izin	8	9	18	21	225.00	233.33
	15.13 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan	Izin	150	102	304	182	202.67	178.43
Terpenuhi-nya kebutuhan listrik masyarakat	17. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	94.46	95.09	99.55	99.98	105.39	105.14
	17.02 Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah perizinan ketenagalistrikan yang diterbitkan	Izin	50	30	80	28	160.00	93.33
	17.03 Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Rumah Tangga yang dipasang listrik murah dan hemat	RTS	950	1.255	950	1255	100.00	100.00
	17.04 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang dibina dan diawasi	Izin	50	30	57	28	114.00	93.33
Terpenuhi-nya kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan yang bersumber dari air tanah	18. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih	KK	2040	765	2,125	425	104.17	55.56
	18.01 Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah rencana teknis pemanfaatan air tanah	Buah	24	14	24	14	100.00	100.00
	18.02 Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah sumur bor yang dibangun	Unit	24	9	25	5	104.17	55.56
	18.03 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Jumlah perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan	Izin	60	60	152	126	253.33	210.00

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		% Capaian	
				2019	2020	2019	2020	Terhadap 2019	Terhadap Target 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5*100%	10=8/6*100%
	18.04 Konservasi Air Tanah	Jumlah zona konservasi air tanah yang direview	Zona	1	3	1	3	100.00	100.00
Tersedianya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	22. Program pencegahan kerusakan lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi	Situs	3	3	7	-	233.33	-
	22.01 Mitigasi rawan bencana alam geologi	Jumlah orang yang memahami bencana alam geologi	Orang	-	500	-	-	-	-
	22.02 Pengelolaan kawasan lindung geologi	Jumlah orang yang memahami keanekaragaman geologi	Orang	200	500	200	-	100.00	-
Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	24. Program Pengembangan dan pemanfaatan energi	Kontribusi Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan	%	5.5	6.62	7.35	8.49	133.64	128.25
	24.01 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah pengelola pembangkit energi baru terbarukan yang terbina.	Buah	4	4	6	5	150.00	125.00
	24.02 Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan	Unit	2	44	2	44	100.00	100.00
	24.03 Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	Jumlah peserta penyuluhan bidang energi	Orang	30	100	35	-	116.67	-

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 terhadap target akhir Renstra Tahun 2019-2023

Dinas ESDM Provinsi NTB telah menentukan rencana program kegiatan beserta target yang ditetapkan pada akhir Renstra Tahun 2019-2023. Target tersebut sejalan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Terdapat lima sasaran strategis yang masuk dalam Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

- Target Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan *Good Mining Practices* sebesar 8,00% pada akhir Renstra Tahun 2019-2023, capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 3,04% yang berasal dari akumulasi realisasi tahun 2019 sebesar 2,17% ditambah realisasi tahun 2020 sebesar 0,87%. Sehingga capaian terhadap target akhir renstra sebesar 38,00%. Jika melihat dari perkembangan regulasi kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, kedepan target tersebut akan sulit dicapai disebabkan beralihnya kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ke Pemerintah Pusat. Dengan demikian perlu adanya reviu terhadap indikator kinerja terkait dengan pertambangan mineral dan batubara.
- Target Rasio Elektrifikasi pada akhir Renstra Tahun 2019-2023 sebesar 97,00%. Realisasi Rasio Elektrifikasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 99,98% dengan capaian sebesar 103,07%. Ada beberapa sebab mengapa

target tersebut sudah dilampaui pada tahun kedua periode Renstra 2019-2023. Pertama dikarenakan target rasio elektrifikasi yang ditetapkan pada Renstra terlalu pesimis atau terlalu rendah sehingga diperlukan revisi target disesuaikan dengan kondisi terkini. Kedua progres perkembangan pembangunan ketenagalistrikan di Provinsi NTB sangat cepat diluar perkiraan yang masuk dalam perhitungan perencanaan. Kenyataannya adalah bahwa penentuan target rasio elektrifikasi pada Renstra periode 2019-2023 telah memperhitungkan realisasi rasio elektrifikasi tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan perkembangan realisasi pembangunan ketenagalistrikan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh PLN yang disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM. Namun dengan adanya program Pemerintah Pusat melalui pembangunan pembangkit 35.00 MW mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat dapat tercapai lebih cepat dari perkiraan.

- c. Target jumlah KK yang terlayani air minum pada akhir Renstra 2019-2023 sebanyak 3.230 KK. Sampai dengan tahun 2020 terealisasi sebanyak 2.550 KK yang berasal dari pembangunan tahun 2019 sebanyak 25 unit sumur bor yang dapat melayani 2.125 KK dan pembangunan tahun 2020 sebanyak 5 unit sumur bor yang dapat melayani 425 KK. Realisasi sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2019-2023 baru mencapai 78,94%. Capaian tersebut merupakan capaian maksimal yang dapat dikontribusikan Dinas ESDM dalam mendukung capaian cakupan air minum, hal ini disebabkan mulai tahun 2021 Dinas ESDM tidak lagi melaksanakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- d. Target jumlah situs geologi yang dilindungi pada masa akhir Renstra 2019-2023 sampai sebanyak 15 situs geologi, realisasi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 7 situs geologi yang berasal dari tahun 2019 sebanyak 7 situs geologi dan pada tahun 2020 tidak ada realisasi disebabkan adanya refocusing anggaran sebagai akibat adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemanfaatan anggaran diarahkan untuk penanganan bidang kesehatan, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi dengan skala prioritas. Capaian tersebut merupakan capaian maksimal yang dapat dikontribusikan Dinas ESDM dalam mendukung pengembangan *Geopark*, hal ini disebabkan mulai tahun 2021 Dinas ESDM tidak lagi melaksanakan kegiatan Pengelolaan kawasan lindung geologi sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- e. Target Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Pembangkit listrik pada akhir Renstra 2019-2023 sebesar 5,57% target tersebut didasarkan oleh Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN. Realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 8,49%. Realisasi tersebut berasal dari adanya beberapa penambahan pembangkit listrik PLN yang bersumber dari energi matahari, energi angin dan energi air. Peran Pemerintah Provinsi dalam hal ini terkait dengan fasilitasi perizinan usaha ketenagalistrikan dan penunjangnya.

Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 terhadap target akhir Renstra Tahun 2019-2023 terhadap lima sasaran strategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan Realiasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2019-2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					REALISASI s/d 2020	REALISASI 2020 THD TARGET AKHIR RENSTRA
		2019	2020	2021	2022	2023		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan <i>Good Mining Practices</i> (%)	2.17	4.00	6.60	7.20	8.00	3,04	38,00% (3,04/8)*100
Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	94.46	95.09	95.72	96.35	97.00	99,98	103,07 %
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air minum dari sumber air tanah (KK)	2040	255	255	255	425	2.550	78,94% (2550/3230)*100
Meningkatnya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi (situs)	3	3	3	3	3	7	46,67% (7/15)*100
Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (%)	5.50	6.62	5.96	5.64	5.57	8.49	152,42% (8,49/5,57)*100
Rata-Rata Capaian Terhadap Periode Akhir Renstra								83,82% (419,10%/5)

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa pada rata-rata capaian sampai dengan tahun 2020 dibandingkan terhadap target akhir Renstra Tahun 2019-2023 sebesar 83,82%. Capaian tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kinerja eksternal Dinas diantaranya capaian Rasio Elektrifikasi dan capaian kontribusi EBT dalam pembangkit listrik. Pada kedua indikator capaian tersebut Pemerintah Provinsi lebih berperan kepada :

- Fasilitasi perizinan terkait pembangunan sarana pembangkit listrik bersama usaha pendukung.
- Fasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Kabpate/Kota terkait dengan peningkatan kapasitas jaringan distribusi dan lama operasi pelayanan listrik terutama bagi daerah-daerah terisolir.
- Peningkatan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik khususnya bagi masyarakat miskin melalui penyambungan listrik murah dan hemat.

Berikut adalah perbandingan antara capaian program dan kegiatan tahun 2020 terhadap target akhir Renstra Tahun 2019-2023 seperti disajikan dalam tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2020 terhadap target akhir Renstra tahun 2019-2023

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2020	Realisasi 2020 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
1	Terwujudnya pelayanan administrasi ESDM yang profesional	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	100	100	100	100	100.00
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat (Buah)	2700	1200	1200	1200	1200	7500	3085	41.13
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Jenis)	3	3	3	3	3	3	3	100.00
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	3	3	3	3	3	3	3	100.00
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan (Orang)	10	10	10	10	10	10	12	120.00
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (Orang)	4	4	4	4	4	4	7	175.00
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (Jenis)	17	17	17	20	20	20	17	85.00
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Jenis)	9	10	10	10	10	10	6	60.00
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	7	8	8	9	10	10	5	50.00
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat (Jenis)	2	2	2	2	2	2	2	100.00
		Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan daerah	Selarasnya Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Tahun)	1	1	1	1	1	5	1	20.00

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2020	Realisasi 2020 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
		Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Selarasnya program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota (Tahun)	1	1	1	1	1	5	1	20.00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100	100	100	100	100	100.00
		Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya peralatan penunjang pelaksanaan kerja (Unit)	11	5	5	5	2	27	10	37.04
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung/kantor (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	100.00
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (Unit)	22	22	22	22	22	22	22	100.00
		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya kondisi peralatan kantor (Unit)	20	50	50	50	50	50	13	26.00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100	100	100	100	100	100	100	100.00
		Peningkatan metal dan fisik aparatur	Jumlah aparatur yang dibina mental dan fisik (Orang)	92	92	92	92	92	92	76	82.61
		Peningkatan SDM aparatur	Jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya (Orang)	2	16	16	16	16	68	-	-
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP	B	B	B	B	BB	BB	B	B
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP (Dokumen)	1	1	1	1	1	5	1	20.00
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan (Dokumen)	1	1	1	1	1	5	1	20.00

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2020	Realisasi 2020 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
		Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja SKPD (Dokumen)	3	3	3	3	4	16	3	18.75
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (Dokumen)	1	1	1	1	1	5	1	20.00
		Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Tersedianya data aset (Dokumen)	1	1	1	1	1	5	1	20.00
2	Terlaksananya pengawasan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (%)	2.17	4	6.6	7.2	8	8	0.87	10.88
		Pendataan hasil produksi di bidang pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang didata produksinya (IUP/IPR)	50	60	60	60	60	290	66	22.76
		Pengawasan usaha pertambangan	Jumlah IUP yang diawasi (IUP)	50	80	65	80	75	350	21	6.00
		Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral logam	Jumlah perizinan pertambangan mineral logam yang diterbitkan (Jumlah Izin)	4	14	18	18	18	72	21	29.17
		Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Jumlah perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan (Jumlah Izin)	150	150	75	75	75	525	182	34.67
3	Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	94.46	95.09	95.72	96.35	97	97	99.98	103.07
		Pengendalian dan evaluasi bidang ketenagalistrikan	Jumlah perizinan ketenagalistrikan yang diterbitkan (Jumlah Izin)	50	75	75	80	80	360	28	7.78
		Pengembangan pemanfaatan bidang ketenagalistrikan	Jumlah Runah Tangga yang dipasang listrik murah dan hemat (RTS)	950	1650	1550	1550	1550	7250	1255	17.31

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2020	Realisasi 2020 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
		Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan bidang ketenagalistrikan	Jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang dibina dan diawasi (Jumlah Izin)	50	50	75	75	75	325	28	8.62
4	Tersedianya air bersih bagi masyarakat	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan Masyarakat yang Terlayani Air Bersih (KK)	2040	425	255	255	425	3400	425	12.50
		Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah rencana teknis pemanfaatan air tanah (buah)	24	5	3	3	5	40	14	35.00
		Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah sumur bor yang dibangun (Unit)	24	5	3	3	5	40	5	12.50
		Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Jumlah perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan (Izin)	60	120	80	80	80	420	126	30.00
		Konservasi air tanah	Jumlah zona konservasi air tanah yang direview (Zona)	1	1	1	1	1	5	3	60.00
5	Terwujudnya perencanaan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang efektif dan efisien	Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase keselarasan pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral (%)	85	90	93	97	100	100	100	100.00
		Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen usulan program/kegiatan (Dokumen)	1	1	1	1	1	5	1	20.00
		Pendataan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen data dan informasi ESDM (Dokumen)	1	1	1	1	1	5	1	20.00
		Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi (Dokumen)	3	3	3	3	3	15	3	20.00
6	Tersedianya situs geologi yang terawat dan terlindungi	Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi (situs)	3	3	3	3	3	15	-	-

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2020	Realisasi 2020 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
		Mitigasi rawan bencana alam geologi	Jumlah orang yang memahami bencana alam geologi	-	1000	1000	1000	1000	4000	0	-
		Pengelolaan kawasan lindung geologi	Jumlah orang yang memahami keanekaragaman geologi (Orang)	700	700	700	700	700	3500	0	-
7	Terwujudnya pengelolaan energi daerah sesuai target bauran energi	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Kontribusi pembangkit energi baru terbarukan (%)	5.5	6.62	5.96	5,64	5.57	5.57	8.49	152.42
		Pembinaan, pengawaaan dan evaluasi pengelolaan energi baru terbarukan	Jumlah pengelola pembangkit energi baru terbarukan yang terbina	1	1	1	1	1	5	5	100.00
		Penyediaan sarana pemanfaatan energi baru terbarukan	Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan (Unit)	-	102	102	102	102	408	44	43.14
		Penyuluhan kegiatan bidang energy	Jumlah peserta penyuluhan bidang energi (Orang)	150	150	150	150	150	750	0	-

Realisasi kinerja program terhadap target akhir Resnra Tahun 2019-2023 terutama terhadap program-program prioritas yang mendukung indikator kinerja pembangunan daerah secara umum belum memenuhi target. Beberapa program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dengan sasaran terlaksananya pengawasan usaha pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 4,00% pemegang IUP dan realisasinya sebesar 0,87% atau sudah mencapai 10,88% dari target akhir Renstra sebesar 8%.
2. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat, indikator Rasio Elektrifikasi ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 95,09% dan pada akhir Renstra sebesar 97,00%. Realisasi Rasio Elektrifikasi pada tahun 2020 sebesar 99,98% atau sudah melebihi 103,07% dari target akhir Renstra.
3. Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah dengan sasaran tersedianya air bersih bagi masyarakat, target indikator kinerja pada tahun 2020 sebanyak 425 KK dengan target akhir Renstra sebesar 3.400KK. Realisasi pada tahun 2020 sebesar 425 KK yang artinya sudah 12,50% dari target akhir Renstra.
4. Program pencegahan kerusakan lingkungan dengan sasaran tersedianya situs geologi yang terawat dan terlindungi, target pada tahun 2020 sebanyak 3 situs geologi dan target akhir Renstra sebanyak 15 situs geologi. Adanya refocusing anggaran terkait dengan penanganan COVID-19 yang berakibat pada pengurangan/penghapusan anggaran untuk Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan sehingga target kinerja program tidak tercapai.
5. Program pengembangan dan pemanfaatan energi dengan sasaran terwujudnya pengelolaan energi daerah sesuai target bauran energi dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Indikator kinerja program tersebut adalah persentase kontribusi pembangkit energi baru terbarukan dengan target pada tahun 2020 sebesar 6,62% dengan target pada akhir Renstra sebesar 5,57%. Realisasi kinerja program pada tahun 2020 sebesar 8,49% atau sudah melebihi 152,42% dari target akhir Renstra. Namun demikian yang harus menjadi catatan adalah target tersebut tidak secara linier mengalami peningkatan, hal ini didasarkan kepada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh PLN, dimana proyeksi target didasarkan atas komposisi pembangunan pembangkit yang didominasi oleh pembangkit yang bersumber dari tenaga fosil.

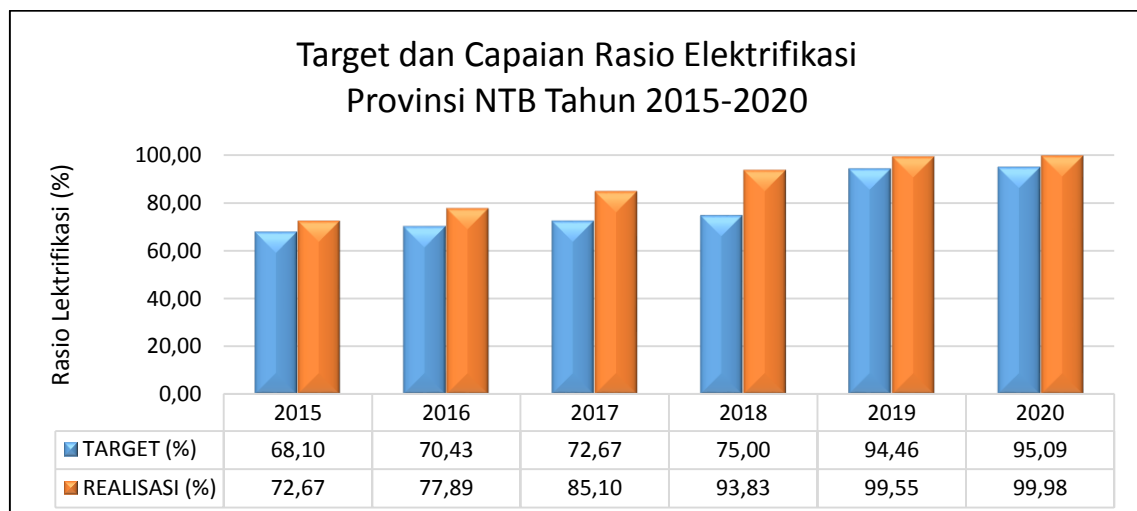
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 terhadap target nasional.

Secara nasional, Pemerintah Pusat mempunyai kegiatan prioritas pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air yang masuk dalam salah satu isu strategis nasional tahun 2020. Dalam rangka peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi, Pemerintah Pusat melaksanakan pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik dan melaksanakan pengembangan energi baru terbarukan. Berdasarkan Indikator Kinerja Urusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terdapat 2 (dua) indikator yang masuk dalam Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral kedua indikator tersebut adalah :

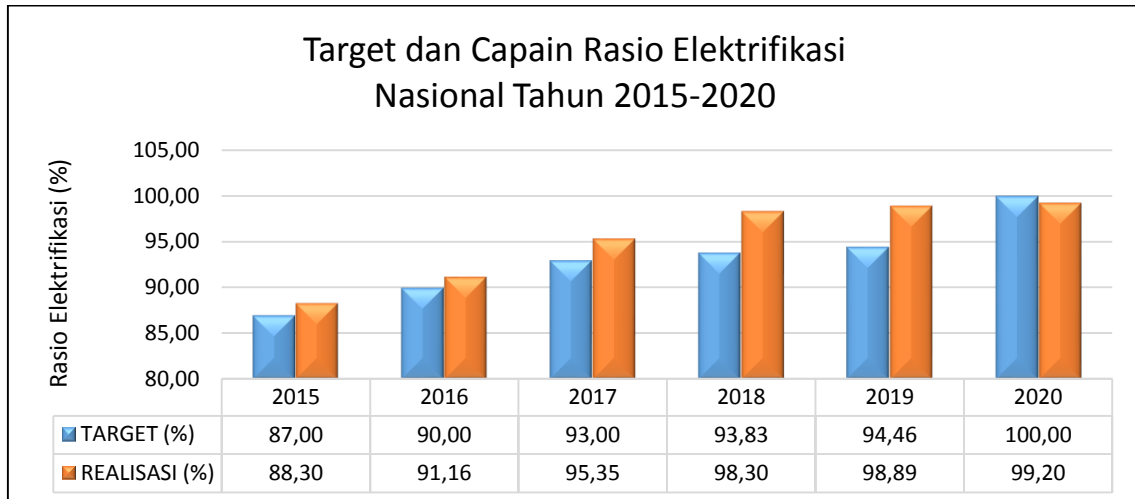
- Rasio Elektrifikasi; dan
- Porsi Energi Baru Terbarukan

Dari kedua indikator kinerja urusan tersebut yang sejalan dengan Provinsi NTB adalah Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi adalah menggambarkan seberapa besar kebutuhan listrik telah terpenuhi untuk masyarakat. Rasio elektrifikasi diformulasikan melalui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik dibagi jumlah rumah tangga secara keseluruhan. Secara nasional target Rasio Elektrifikasi tahun 2020 sebesar 100,00% dengan realisasi 99,20% (capaian 99,20%)

Sejalan dengan prioritas nasional, Pemerintah Provinsi NTB melalui Misi ke 5 RPJMD Tahun 2019-2023 NTB Sejahtera dan Mandiri dengan salah satu sasarnya adalah terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan salah satu indikatornya adalah Rasio Elektrifikasi. Target Rasio elektrifikasi tahun 2020 sebesar 95,09% dengan realisasi sebesar 99,98% (capaian 105,14%). Berikut ini grafik yang menggambarkan perbandingan target dan capaian Rasio Elektrifikasi nasional dengan Provinsi NTB dimana capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB lebih tinggi 0,78% dari capaian Rasio Elektrifikasi Nasional.

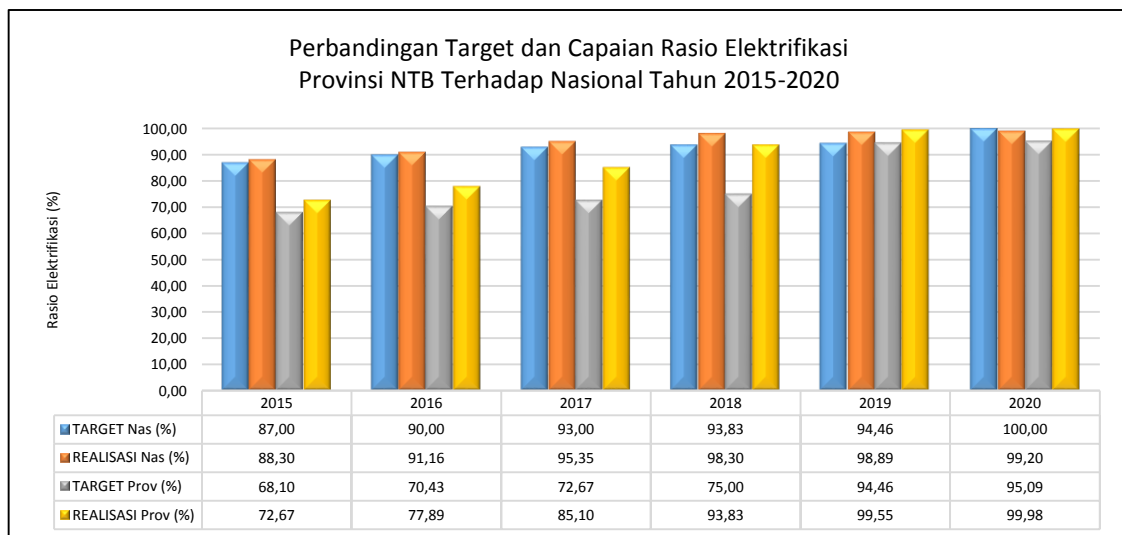


Gambar 3.1 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2015-2020



Gambar 3.2 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2015-2020

Kedua grafik menggambarkan bahwa tren peningkatan rasio elektrifikasi Provinsi NTB maupun Nasional dari tahun 2015-2020 selalu meningkat melebihi target secara linier. Peningkatan Rasio Elektrifikasi disebabkan oleh meningkatnya pasokan listrik dan perluasan jaringan distribusi secara nasional yang sangat mempengaruhi kondisi kelistrikan di daerah termasuk di Provinsi NTB. Untuk memudahkan mengenai gambaran perbandingan perkembangan capaian Rasio Elektrifikasi antara Nasional dan Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar grafik 3.3 di bawah ini :



Gambar 3.3 Perbandingan Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Terhadap Nasional Tahun 2015-2020

Dari grafik diatas, terlihat bahwa Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB secara perlahan dapat mendekati capaian secara nasional, bahkan sejak tahun 2019 dapat melampaui capaian secara nasional.

Secara nasional Provinsi NTB termasuk ke dalam 29 provinsi dengan Rasio Elektrifikasi diatas 95%. Dibandingkan dengan Provinsi tetangga Nusa Tenggara Timur yang mempunyai Rasio Elektrifikasi sekitar 88%, Provinsi NTB masih jauh lebih baik, namun demikian masih dibawah Provinsi Bali yang sudah 100%.

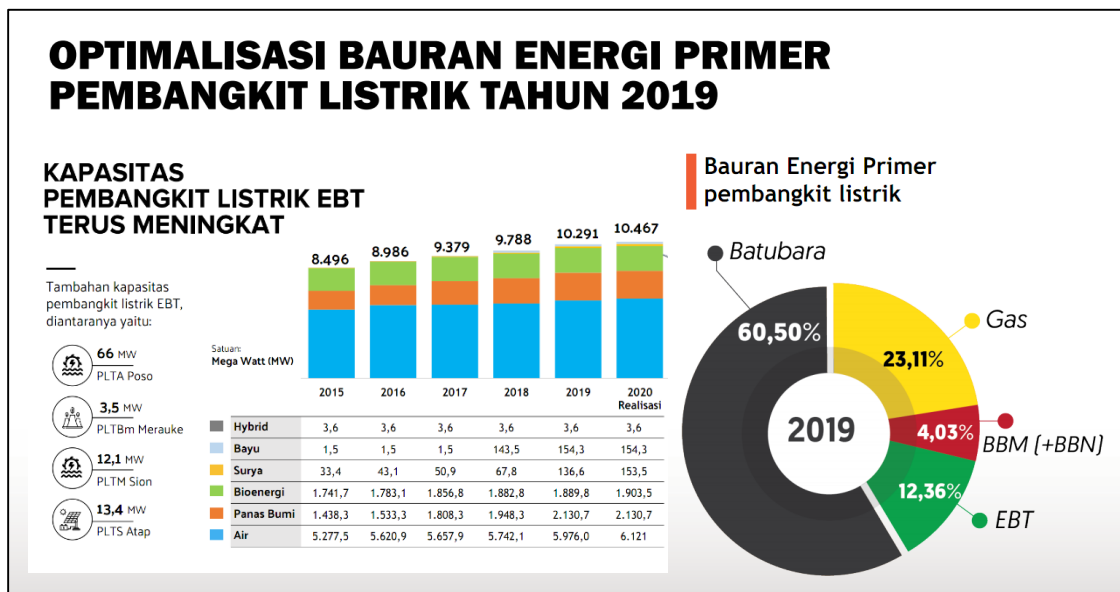


Gambar 3.4 Sebaran Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2020

Untuk capaian kinerja yang terkait dengan meningkatnya kontribusi EBT dalam pembangkit listrik secara nasional, sampai dengan awal tahun 2021 belum ada rilis data resmi kapasitas total pembangkit listrik nasional tahun 2020. Namun demikian terdapat penambahan kapasitas listrik yang bersumber dari pembangkit EBT dengan total daya sebesar 10.467 MW atau meningkat sebesar 176 MW dari tahun 2019 sebesar 10.291 MW. Berdasarkan data tahun 2019 kontribusi EBT dalam pembangkit listrik secara nasional sebesar 12,36%, pada tahun yang sama kontribusi EBT dalam pembangkit listrik sebesar 7,35% atau masih dibawah rata-rata nasional. Untuk capaian tahun 2020 belum tersedia data kontribusi EBT dalam pembangkit listrik secara nasional, capaian kontribusi EBT dalam pembangkit listrik di Provinsi NTB sebesar 8,49% meningkat 1,14% dibanding tahun 2019. Namun demikian angka 8,49% masih dibawah rata-rata nasional walaupun dibandingkan dengan capaian nasional tahun 2019.

Kemampuan fiskal Pemerintah Daerah tidak memungkinkan untuk meningkatkan kontribusi EBT dalam pembangkit listrik mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunannya. Namun demikian melalui regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah menargetkan peningkatan bauran energi pada 2025 sebesar 23% energi baru terbarukan. Peningkatan kontribusi EBT dalam pembangkit listrik selama ini didapat dari pembangunan pembangkit listrik EBT dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus, APBN

Kementerian ESDM, Kementerian PDT dan Kementerian lainnya. Selain itu juga pembangunan pembangkit EBT yang dilaksanakan oleh PLN dengan anggaran PLN dan



Independent Power Producer (IPP) swasta yang dayanya dijual ke PLN.

Gambar 3.5 Kontribusi EBT dalam Pembangkit Listrik Nasional Tahun 2019 dan Perkembangan Kapasitas Pembangkit EBT Nasional 2015-2020

Kinerja Provinsi NTB dalam bidang pertambangan mineral dan batubara pada tahun 2020 tidak tercapai sesuai target, pada tahun 2020 target peningkatan prosentase Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menerapkan kaidah pertambangan yang baik dan benar sebesar 4% namun realisasi tahun 2020 hanya sebesar 0,87%. Tidak tercapainya target disebabkan adanya pengurangan anggaran akibat refocusing dan terbitnya regulasi baru yang membatasi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam bidang mineral dan batubara. Kinerja bidang pertambangan mineral dan batubara Provinsi tidak dapat dibandingkan dengan kinerja nasional karena adanya perbedaan indikator kinerja. Indikator capaian kinerja pertambangan mineral dan batubara nasional lebih ditekankan pada kinerja produksi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun demikian, ada target nasional yang menjadi target Provinsi terkait dengan industrialisasi bidang pertambangan dan peningkatan nilai tambah mineral melalui pembangunan smelter. Target pembangunan smelter yang sebelumnya dijadwalkan beroperasi tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan penjadwalan ulang.

Terkait dengan kinerja peningkatan cakupan air minum yang bersumber dari air tanah melalui pembangunan sumur bor, pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 9 sumur bor dibangun untuk memberikan air minum kepada 765 KK, namun hanya sebanyak 5 unit sumur bor yang berhasil dibangun untuk memenuhi kebutuhan air minum 425 KK. Tidak tercapainya kinerja peningkatan cakupan air minum melalui pembangunan sumur bor tersebut disebabkan adanya refocusing anggaran yang berakibat pada tidak tersedianya anggaran untuk pembangunan sumur bor. Pada sisi lain, tahun 2020 Provinsi NTB tidak mendapatkan alokasi pembangunan sumur bor dari Pemerintah melalui Kementerian ESDM. Pada tahun-tahun sebelumnya Provinsi NTB

selalu mendapatkan alokasi sumur bor dari Pemerintah, namun adanya refokusing anggaran berakibat pada pengurangan jumlah pembangunan sumur bor di beberapa daerah termasuk Provinsi NTB.

5. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja organisasi

Pengukuran pencapaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi NTB. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator keluaran dan hasil yang akan memberikan manfaat dan dampak baik langsung maupun tidak langsung. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) atau proses penyusunan kebijakan program/kegiatan strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Terkait dengan keberhasilan Provinsi NTB dalam meningkatkan cakupan listrik, dibutuhkan ketersediaan daya yang memadai dan jaringan yang luas. Usaha penyediaan listrik termasuk kedalam kriteria usaha yang padat teknologi dan padat modal, karenanya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagalistrikan cukup tinggi. PLN sebagai perusahaan penyedia energi listrik jaringannya belum dapat menjangkau semua wilayah Provinsi NTB karena adanya keterbatasan akses menuju beberapa wilayah yang terisolasi terutama di Pulau Sumbawa. Karenanya untuk melayani kebutuhan energi listrik pada daerah kepulauan dan daerah perbatasan yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN, Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan yang bersumber dari tenaga matahari, tenaga air dan tenaga angin dengan pembiayaan yang berasal dari APBN, Anggaran PLN, APBD, dan swasta melalui *Independent Power Producer* (IPP).

Untuk mencapai target Rasio Elektrifikasi Pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan program/kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, dilaksanakan melalui Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, dengan kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan melalui Pemasangan Listrik Murah dan Hemat (penyambungan listrik gratis) terhadap 1.255 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang termasuk dalam keluarga miskin berdasarkan basis data terpadu TNP2K dengan alokasi di Kabupaten Lombok Barat 270 RTS, Kabupaten Lombok Utara 87 RTS, Kabupaten Lombok Tengah 398 RTS dan Kabupaten Lombok Timur 500 RTS. Sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi 1.255 RTS (100%). Pemasangan Listrik Murah dan Hemat telah dilaksanakan sejak tahun 2012 dengan pendanaan baik bersumber dari APBN, APBD maupun bantuan dari PLN yang sampai dengan tahun 2020 telah tersambung sebanyak 26.482 RTS.

Penyediaan tenaga listrik di NTB dikembangkan melalui dua cara yaitu melalui listrik konvensional PT. PLN (*on grid*) dan listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (*off grid*) yang dikembangkan untuk wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Melalui pengembangan tersebut sebanyak 1.143 desa/kelurahan di Provinsi NTB telah 100% terlistriki, namun demikian masih ada 44 dusun di seluruh Provinsi NTB belum berlistrik. Ke-44 dusun tersebut direncanakan akan dapat terlistriki hingga tahun 2022 mendatang melalui sinergi pembangunan yang dilaksanakan oleh PLN, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui program listrik perdesaan.

Target peningkatan rasio elektrifikasi sampai dengan akhir Tahun 2020 dicapai melalui pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan kontribusi Pemerintah Pusat melalui APBN, Anggaran PT. PLN serta swasta melalui *Independent Power Producer* (IPP). Sedangkan Peran Pemerintah Daerah terbatas pada pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin melalui pemasangan listrik murah dan hemat. Peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan listrik pada tahun 2020 sebanyak 78.006 KK dimana 1.255 KK (1,61%) diantaranya merupakan masyarakat miskin yang mendapatkan listrik dari program pemasangan listrik murah dan hemat oleh Pemerintah Provinsi NTB, sedangkan sisanya merupakan partisipasi masyarakat secara mandiri.

Pengembangan ketenagalistrikan saat ini memberikan kesempatan bagi badan usaha swasta untuk memproduksi listrik melalui *Independent Power Producer* (IPP). Sebagai bagian dari target pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW, di Provinsi NTB telah direncanakan mendapat tambahan daya sebesar 500 MW hingga tahun 2021. Secara umum untuk kondisi penyediaan ketenagalistrikan yang bersumber dari listrik PLN untuk Provinsi Nusa Tenggara telah mengalami peningkatan yang menggembirakan berdasarkan data PLN sampai dengan akhir tahun 2020 kondisi kelistrikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Perkembangan Neraca Daya Listrik Sistem NTB 2018-2020

No	Sistem	Daya Mampu Pasok (MW)			Beban Puncak (MW)			Cadangan Daya (MW)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Lombok	270,75	290,05	328,22	226,17	243,78	265,48	44,58	46,27	62,74
2	Sumbawa	52,00	-	-	44,06	-	-	7,94	-	-
3	Bima	47,55	-	-	42,73	-	-	4,82	-	-
4	Tambora	-	153,97	137,8	-	94,74	116,5	-	59,23	21,3
	JUMLAH	370,30	444,02	466,02	312,96	338,52	381,98	57,34	105,50	84,04

Sumber : PLN Wilayah NTB Tahun 2020

Dilihat dari tabel diatas perkembangan neraca daya dari tahun 2018 ke tahun 2020 semakin meningkat, kondisi demikian juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelanggan PLN yang pada gilirannya akan meningkatkan

Rasio Elektrifikasi yang peningkatannya berbanding lurus dengan peningkatan ketersediaan daya.

Kemudian, dalam rangka meningkatkan kontribusi EBT dalam bauran energi non listrik, Pemerintah Provinsi NTB telah memberikan komitmen dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Daerah yang menargetkan kontribusi EBT sebesar 24% pada tahun 2025. Dalam rangka memenuhi target tersebut Dinas Pertambangan telah melaksanakan Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi melalui Pembangunan Digester Biogas dengan kapasitas 4 m³ sebanyak 44 unit yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 22 unit dan di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 22 Unit yang keseluruhannya telah terealisasi (100%). Pembangunan digester biogas telah dilaksanakan di Provinsi NTB sejak tahun 2012 baik melalui anggaran APBD maupun APBN dan bekerjasama dengan HIVOS. Sampai dengan tahun 2020 telah terbangun 6.155 unit biogas.

Dalam hal peningkatan cakupan air minum, Dinas ESDM berkontribusi terhadap peningkatan cakupan air minum yang menjadi indikator kinerja utama Dinas PUPR. Dinas ESDM bersama dengan OPD lainnya seperti BPBD dan Dinas Sosial mendukung cakupan air minum. Kontribusi Dinas ESDM dalam capaian cakupan air minum tahun 2020 hanya sebesar sebesar 425 KK, besaran persentase capaian kontribusi cakupan air minum tahun 2020 belum dapat dihitung karena belum adanya rilis data dari Dinas PUPR. Namun demikian cakupan air bersih tahun 2018 sebesar 225 KK atau 0,06%, capaian kontribusi cakupan air bersih tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 2.125 KK atau 0,15%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan alokasi anggaran untuk penyediaan air bersih melalui pemanfaatan air tanah pada tahun 2019.

Kontribusi sektor pertambangan melalui lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 17,00% (BPS TW III 2020) meningkat 4,91% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 12,09%. Jenis lapangan usaha pertambangan dan penggalian untuk tahun 2020 menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap PDRB Provinsi NTB tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor pertambangan mineral masih mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan usaha pertambangan di Provinsi NTB terdiri dari komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 322 IUP dan 5 IPR yang terdaftar dan masih berlaku masa izinnnya.

Peranan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 adalah dalam hal pemberian perizinan usaha pertambangan. penetapan WIUP dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang dan pengawasan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sejak tanggal 11 Juni 2020 kewenangan Pemerintah Provinsi terkait dengan pertambangan mineral dan batubara dialihkan ke Pemerintah Pusat sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Secara umum efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya termasuk anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam pengertian lain efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* dan *output*, seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Secara umum dilihat dari capaian kinerja dan penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun anggaran mengarah pada peningkatan yang semakin efisien, hal ini dapat dilihat dari semakin sedikit jumlah pegawai dan semakin kecil jumlah anggaran yang digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja pada akhirnya selalu melampaui target. Namun demikian kondisi penggunaan sumber daya tersebut tidak berhubungan secara linier dengan capaian kinerja, hal ini disebabkan karena capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal program Pemerintah Provinsi NTB baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Perusahaan BUMN dan Swasta serta partisipasi masyarakat secara mandiri.

Untuk menggambarkan hubungan antara sumber daya baik sumber daya manusia maupun anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja Dinas yang optimal berikut adalah tabel yang menggambarkan perbandingan jumlah sumber daya manusia (pegawai) yang digunakan, jumlah anggaran yang digunakan dan hasil kinerja berupa capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Elektrifikasi disajikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2020 :

Tabel 3.9 Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2018-2020

No	URAIAN	2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Pegawai (orang)	90	90	82	82	76	76
2	Belanja (Rp)	21.594.060.300	19.463.617.200	19.360.068.700	17.745.343.682	13.685.124.455	11.616.220.542
3	Belanja Langsung (Rp)	13.042.817.600	11.614.758.720	10.953.436.200	10.214.494.461	6.231.941.455	4.803.848.680
4	Belanja Tidak Langsung (Rp)	8.209.306.000	7.516.363.440	8.406.632.500	7.530.849.1221	7.453.183.000	6.812.371.862
5	Realisasi Keuangan (%)	100	90,13	100	91,66	100	84,88
6	Realisasi Fisik (%)	100	100	100	98,66	100	91,45
7	IKU (RE %)	75,00	93,83	94,46	99,55	95,09	99,98

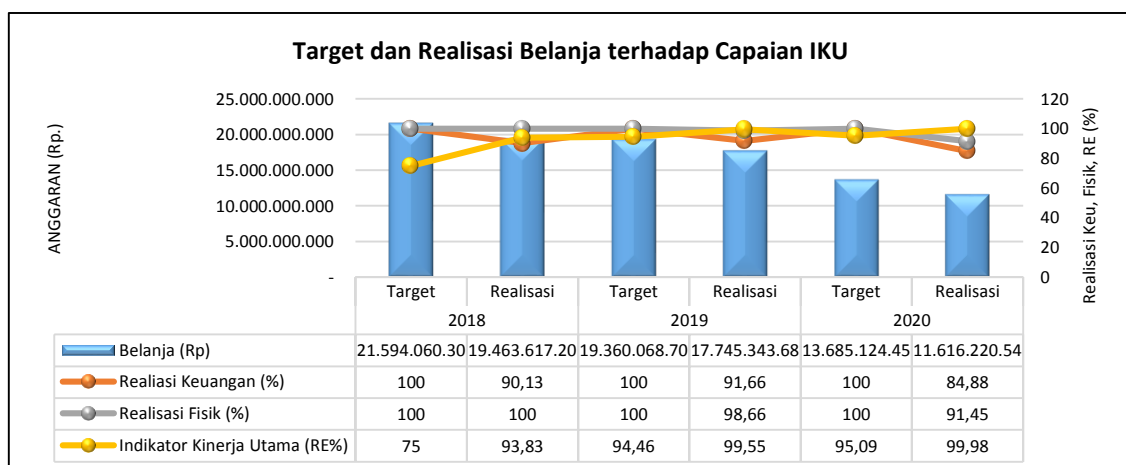
Dari gambaran tabel 3.9 diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target IKU adalah sebagai berikut :

- Penggunaan sumber daya manusia dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami tren penurunan dari 90 pegawai di 2018 menjadi 76 pegawai di akhir tahun 2020, rata-rata penuruan pegawai selama tiga tahun sebesar

15,56%. Penurunan jumlah pegawai disebabkan adanya pegawai yang pensiun dan mutasi ke SKPD lain. Dari jumlah 76 personil mempunyai komposisi yang terdiri dari 11 orang golongan IV (14,47%), 43 orang golongan III (56,58%) dan 22 orang golongan II (28,95%). Berdasarkan pendidikan terdiri dari 12 orang pasca sarjana (S2) sebanyak 15,79%, 34 orang sarjana (S1) sebanyak 44,74%, 27 orang berpendidikan SLTA sebanyak 35,53%, dan 3 orang berpendidikan SLTP sebanyak 3,95%.

- b. Penggunaan sumber daya anggaran, seperti halnya penggunaan sumber daya manusia juga mengalami penurunan dari anggaran Rp. 21.594.060.300,- pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga tahun 2020 sebesar Rp. 13.685.124.455,-. Kondisi fiskal provinsi NTB semakin tahun semakin meningkat, namun demikian kebijakan anggaran terhadap belanja untuk memenuhi kebutuhan sektor ESDM semakin menurun, hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang sebelumnya memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Skala Kecil, sejak tahun 2019 sudah tidak lagi memberikan DAK tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap alokasi porsi anggaran untuk pembangunan ketenagalistrikan dan penyediaan air bersih.
- c. Realisasi penyerapan anggaran mengalami fluktuasi yang tidak linier yang berkisar antara 84,88% hingga 91,66%, perkembangan realisasi keuangan sangat dipengaruhi oleh rencana penganggaran dan penawaran pekerjaan yang dilelang, khususnya untuk belanja fisik infrastruktur ESDM yang mempunyai nilai anggaran yang besar.
- d. Perkembangan capaian indikator kinerja utama dinas mengalami kenaikan secara signifikan, terutama peningkatan Rasio Elektrifikasi dimana pada tahun 2019 sebesar 99,55% menjadi 99,98% pada tahun 2020. Namun demikian jika dilihat dari capaian yang membandingkan antara target dengan realisasi mengalami fluktuasi peningkatan yang tidak linier.

Secara grafis hubungan antara Target dan Realisasi Belanja terhadap Capaian IKU dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.6 Target dan Realisasi Belanja terhadap Capaian IKU 2018-2020

Dari uraian penjelasan tersebut diatas menggambarkan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah sumber daya berupa pegawai dan anggaran dinas terhadap kinerja dinas. Ada banyak faktor eksternal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja dinas faktor tersebut diantaranya adalah :

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Regulasi yang baik dan pelaksanaan program kegiatan yang efisien dapat mendorong peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas.
- b. Kinerja stakeholder lain yang mendukung kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB dalam meningkatkan Rasio Elektrifikasi seperti : PLN, Sektor penyedia energi listrik swasta (*Independent Power Producer*) dan kebijakan Pemerintah Pusat.
- c. Pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dan air secara mandiri.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Diperlukan program dan kegiatan yang tepat untuk mencapai keberhasilan pencapaian kinerja yang optimal. Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama yang menjadi tugas Dinas, pada tahun 2020 Dinas ESDM Provinsi NTB telah melaksanakan 11 Program prioritas yang didalamnya terdapat 41 kegiatan sesuai RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sebanyak 6 program diantaranya merupakan program yang bersifat rutin untuk menunjang operasional kantor dan 5 program lainnya merupakan program strategis yang mendukung kinerja Dinas. Ke 5 program tersebut adalah :

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
- b. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
- c. Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah;
- d. Program pencegahan kerusakan lingkungan;
- e. Program pengembangan dan pemanfaatan energi.

Program-program tersebut adalah program prioritas dan program unggulan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam rangka melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan bidang sumber daya mineral di Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 setidaknya ada 2 tujuan yang harus dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB sesuai dengan Misi 5 dan Misi 4 RPJMD 2019-2023. Dinas ESDM Provinsi NTB mempunyai tugas utama untuk mencapai target indikator kinerja sasaran RPJMD tahun 2019-2023 berupa Rasio Elektrifikasi dan cakupan air bersih. Target Rasio Elektrifikasi tahun 2020 sebesar 95,09% telah tercapai menjadi 99,98% dengan capaian 105,14%. Peningkatan

rasio elektrifikasi diintervensi melalui program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan program pengembangan dan dan pemanfaatan energi. Pelaksanaan program tersebut untuk menjangkau akses masyarakat yang belum mendapatkan layanan listrik.

Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan program pengembangan dan pemanfaatan energi telah diselaraskan dengan program-program lainnya yang mendukung peningkatan capaian kinerja secara internal. Secara eksternal pelaksanaan program-program Dinas ESDM juga dikolaborasikan dengan program Pemerintah Pusat dan *stakeholder* lainnya diantaranya :

- a. Program listrik perdesaan oleh pemerintah pusat melalui yang dilaksanakan oleh PT. PLN dengan Anggaran APBN dan APLN.
- b. Program pembangunan pembangkit dan jaringan 35.000 MW.
- c. Program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat kurang mampu.
- d. Program pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat kurang mampu yang dilaksanakan oleh asosiasi pegawai Kemeterian ESDM.

Sedangkan untuk indikator kinerja terkait dengan cakupan air bersih dilaksanakan melalui program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah melalui pembangunan sumur bor dalam. Untuk program yang mendukung pencapaian cakupan air bersih perhitungan capaian kinerja Dinas belum memperhitungkan dengan kinerja SKPD penaggungjawab utama maupaun kontribusi anggaran selain pemerintah. Pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah dikolaborasikan dengan program penelitian, penyelidikan, perekayasa dan pelayanan air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan, serta program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan swasta dan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap penyediaan air bersih masyarakat seperti Planet Water, Islamic Relief dan lain-lain.

Pemilihan 5 program prioritas sebagaimana yang disebutkan diatas sangat tepat dan sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Hal tersebut dibuktikan dengan kinerja Dinas terkait dengan keberhasilan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK) diperlukan dukungan program/kegiatan dan anggaran yang menyertainya. Program/kegiatan tersebut tidak hanya yang terkait langsung dengan target kinerja yang diperjanjikan akan tetapi program/kegiatan yang bersifat operasional rutin yang mendukung indikator kinerja utama Dinas. Berikut ini disajikan program/kegiatan, target indikator kinerja dan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kinerja yang diperjanjikan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020.

Tabel 3.10. Program/Kegiatan, Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran	Keterangan
3.05.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	588,154,224	Mendukung sasaran strategis nomor 1
3.05.01.01.01	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	1700 surat	1,102,500	Mendukung sasaran strategis nomor 1.a
3.05.01.01.02	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	124,796,200	Mendukung sasaran strategis nomor 1.b
3.05.01.01.03	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	8,400,000	Mendukung sasaran strategis nomor 1.c
3.05.01.01.07	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 orang	147,725,000	Mendukung sasaran strategis nomor 1.d
3.05.01.01.08	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	7 orang	106,949,400	Mendukung sasaran strategis nomor 1.e
3.05.01.01.09	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	17 jenis	10,001,700	Mendukung sasaran strategis nomor 1.f
3.05.01.01.11	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	5,548,800	Mendukung sasaran strategis nomor 1.g
3.05.01.01.12	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	992,000	Mendukung sasaran strategis nomor 1.h
3.05.01.01.17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan	2 jenis	8,415,000	Mendukung sasaran strategis nomor 1.i
3.05.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Keselaranan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	1 tahun	17,272,200	Mendukung sasaran strategis nomor 1.j
3.05.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Keselaranan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 tahun	156,951,424	Mendukung sasaran strategis nomor 1.k
3.05.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	191,871,734	Mendukung sasaran strategis nomor 2
3.05.01.02.11	Kegiatan Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya peralatan elektronik	13 unit	70,378,000	Mendukung sasaran strategis nomor 2.a
3.05.01.02.22	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	2 unit	-	Mendukung sasaran strategis nomor 2.b
3.05.01.02.24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	22 unit	114,168,734	Mendukung sasaran strategis nomor 2.c
3.05.01.02.30	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya kondisi peralatan kantor	30 unit	15,575,000	Mendukung sasaran strategis nomor 2.4
3.05.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	Mendukung sasaran strategis nomor 3
3.05.01.05.04	Kegiatan Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terbinanya mental dan fisik aparatur	92 orang	-	Mendukung sasaran strategis nomor 3.a
3.05.01.05.05	Kegiatan Peningkatan SDM aparatur	Tersedianya biaya peningkatan SDM Aparatur	1 orang	-	Mendukung sasaran strategis nomor 3.b
3.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP	B	195,023,800	Mendukung sasaran strategis nomor 4
3.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 dok	52,000,000	Mendukung sasaran strategis nomor 4.a
3.05.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan	1 dok	27,332,000	Mendukung sasaran strategis nomor 4.b
3.05.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Rencana Kerja SKPD	3 dok	115,691,800	Mendukung sasaran strategis nomor 4.c
3.05.01.07	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya data asset atau barang milik daerah	1 dok	22,447,900	Mendukung sasaran strategis nomor 5
3.05.01.07.01	Kegiatan Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersedianya data asset atau barang milik daerah	1 dok	22,447,900	Mendukung sasaran strategis nomor 5.a
3.05.01.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	4.00%	67,202,557	Mendukung sasaran strategis nomor 6
3.05.01.15.04	Pendataan Hasil Produksi dibidang Pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang didata produksinya	45 izin	18,607,500	Mendukung sasaran strategis nomor 6.a
3.05.01.15.10	Pengawasan usaha pertambangan	Jumlah IUP/IPR yang diawasi	45 izin	13,301,957	Mendukung sasaran strategis nomor 6.b
3.05.01.15.12	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Logam	Jumlah perizinan pertambangan mineral logam yang diterbitkan	9 izin	11,830,000	Mendukung sasaran strategis nomor 6.c

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran	Keterangan
3.05.01.15.13	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan	102 izin	23,463,100	Mendukung sasaran strategis nomor 6.d
3.05.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	95.09%	1,413,232,900	Mendukung sasaran strategis nomor 7
3.05.01.17.02	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah perizinan ketenagalistrikan yang diterbitkan	30 izin	17,547,000	Mendukung sasaran strategis nomor 7.a
3.05.01.17.03	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Rumah Tangga yang dipasang listrik murah dan hemat	1255 RTS	1,387,178,400	Mendukung sasaran strategis nomor 7.b
3.05.01.17.04	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang dibina dan diawasi	30 izin	8,507,500	Mendukung sasaran strategis nomor 7.c
3.05.01.18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih	765 KK	2,707,629,656	Mendukung sasaran strategis nomor 8
3.05.01.18.01	Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah rencana teknis pemanfaatan air tanah	14 buah	18,230,000	Mendukung sasaran strategis nomor 8.a
3.05.01.18.02	Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Jumlah sumur bor yang dibangun	9 unit	2,649,972,628	Mendukung sasaran strategis nomor 8.b
3.05.01.18.03	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Jumlah perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan	60 izin	38,109,628	Mendukung sasaran strategis nomor 8.c
3.05.01.18.04	Konservasi Air Tanah	Jumlah zona konservasi air tanah yang direview	3 zona	1,317,400	Mendukung sasaran strategis nomor 8.d
3.05.01.19	Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral	Presentase keselarasan rencana pengembangan dan pengelolaan ESDM	100%	170,759,289	Mendukung sasaran strategis nomor 9
3.05.01.19.01	Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah Dokumen Kegiatan Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	1 dok	56,592,889	Mendukung sasaran strategis nomor 9.a
3.05.01.19.02	Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah dokumen data dan informasi Sektor ESDM	1 dok	53,649,500	Mendukung sasaran strategis nomor 9.b
3.05.01.19.03	Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang ESDM	2 dok	60,516,900	Mendukung sasaran strategis nomor 9.c
3.05.01.22	Program pencegahan kerusakan lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi	3 situs	-	Mendukung sasaran strategis nomor 10
3.05.01.22.01	Mitigasi rawan bencana alam geologi	Jumlah orang yang memahami bencana alam geologi	500 orang	-	Mendukung sasaran strategis nomor 10.a
3.05.01.22.02	Pengelolaan kawasan lindung geologi	Jumlah orang yang memahami keanekaragaman geologi	500 Orang	-	Mendukung sasaran strategis nomor 10.b
3.05.01.24	Program Pengembangan dan pemanfaatan energi	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan	6.62%	683,164,895	Mendukung sasaran strategis nomor 11
3.05.01.24.01	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah pengelola pembangkit energi baru terbarukan yang terbina.	4 buah	10,510,000	Mendukung sasaran strategis nomor 11.a
3.05.01.24.02	Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan	44 unit	653,074,895	Mendukung sasaran strategis nomor 11.b
3.05.01.24.03	Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	Jumlah peserta penyuluhan bidang energi	100 orang	19,580,000	Mendukung sasaran strategis nomor 11.c

Selain pengukuran capaian kinerja untuk melihat sejauh mana keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan, hal lain yang penting untuk dianalisis adalah bagaimana realisasi anggaran yang dibelanjakan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Berikut ini adalah realisasi belanja Dinas ESDM Provinsi NTB yang bersumber dari APBD sebagaimana disajikan dalam tabel 3.11 dibawah ini

Tabel 3.11 Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung melalui APBD Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan SKPD

Kode	Program/Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
2.03.01	BELANJA (Induk&Cabang)			13.685.124.455	11.616.220.542	84,88	91,45
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			7.453.183.000	6.812.371.862	91,40	99,90
5.1.1	Belanja Pegawai	Tahun	1	7.453.183.000	6.812.371.862	91,40	99,90
	Gaji dan Tunjangan	Bulan	14	5.363.233.000	5.011.815.702	93,45	100,00
	Tambahan Penghasilan PNS	Bulan	13	2.082.450.000	1.800.556.160	86,46	100,00
	Insentif Pemungutan Ret. Daerah	Tahun	1	7.500.000	-	-	-
5.2	BELANJA LANGSUNG			6.039.486.955	4.631.618.064	76,69	80,75
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	588.154.224	551.352.919	93,74	100,00
5.2.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	1.700	1.102.500	1.102.500	100,00	100,00
5.2.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	3	124.796.200	89.425.139	71,66	100,00
5.2.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	3	8.400.000	8.400.000	100,00	100,00
5.2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Orang	12	147.725.000	147.650.000	99,95	100,00
5.2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Orang	7	106.949.400	106.169.184	99,27	100,00
5.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis	17	10.001.700	10.001.300	100,00	100,00
5.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis	10	5.548.800	5.548.800	100,00	100,00
5.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	8	992.000	992.000	100,00	100,00
5.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis	2	8.415.000	8.409.000	99,93	100,00
5.2.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tahun	1	17.272.200	17.272.200	100,00	100,00
5.2.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tahun	1	156.951.424	156.382.796	99,64	100,00
5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	191.871.734	189.015.535	98,51	100,00
5.2.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Unit	10	70.378.000	70.378.000	100,00	100,00
5.2.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Unit	1	-	-	-	-
5.2.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Unit	22	114.168.734	111.317.035	97,50	100,00
5.2.02.30	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	6	7.325.000	7.320.500	99,94	100,00
5.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	-	-	-	-
5.2.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Orang	92	-	-	-	-
5.2.05.20	Peningkatan SDM Aparatur	Orang	1	-	-	-	-
5.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai	B	195.023.800	193.327.800	99,13	100,00
5.2.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	52.000.000	52.000.000	100,00	100,00
5.2.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	27.332.000	27.020.400	98,86	100,00
5.2.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen	3	115.691.800	114.307.400	98,80	100,00
5.2.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	1	22.447.900	22.447.900	100,00	100,00
5.2.07.01	Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah	Dokumen	1	22.447.900	22.447.900	100,00	100,00
5.2.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	%	4,00	67.202.557	67.202.557	100,00	100,00

Kode	Program/Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
5.2.15.04	Pendataan Hasil Produksi di bidang Pertambangan	IUP/IPR	45	18.607.500	18.607.500	100,00	100,00
5.2.15.10	Pengawasan Usaha Pertambangan	IUP/IPR	45	13.301.957	13.301.957	100,00	100,00
5.2.15.12	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Logam	Izin	4	11.830.000	11.830.000	100,00	100,00
5.2.15.13	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Izin	102	23.463.100	23.463.100	100,00	100,00
Sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Listrik							
5.2.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	%	95,09	1.413.232.900	1.413.112.750	99,99	100,00
5.2.17.02	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Izin	30	17.547.000	17.547.000	100,00	100,00
5.2.17.03	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	RTS	1.255	1.387.178.400	1.387.058.250	99,99	100,00
5.2.17.04	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Izin	30	8.507.500	8.507.500	100,00	100,00
Sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih							
5.2.18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	KK	765	2.707.629.656	1.345.112.539	49,68	57,07
5.2.18.01	Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Air Tanah	Buah	14	18.230.000	18.230.000	100,00	100,00
5.2.18.02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Air Tanah	Unit	9	2.649.972.628	1.287.455.511	48,58	56,14
5.2.18.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah	Izin	60	38.109.628	38.109.628	100,00	100,00
5.2.18.04	Konservasi Air Tanah	Zona	3	1.317.400	1.317.400	100,00	100,00
5.2.19	Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral	%	100	170.759.289	167.335.169	97,99	100,00
5.2.19.01	Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	1	56.592.889	56.592.889	100,00	100,00
5.2.19.02	Pendataan Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	1	53.649.500	52.250.000	97,39	100,00
5.2.19.03	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	2	60.516.900	58.492.280	96,65	100,00
Sasaran Meningkatnya Situs Geologi Sebagai Cagar Alam Geologi							
5.2.22	Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Situs	3	-	-	-	-
5.2.22.01	Mitigasi rawan bencana alam geologi	Orang	500	-	-	-	-
5.2.22.02	Pengelolaan kawasan lindung geologi	Orang	500	-	-	-	-
Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pembangkit Listrik Yang Bersumber Dari energi baru Terbarukan							
5.2.24	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	%	6,62	683.164.895	682.710.895	99,93	100,00
5.2.24.01	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Buah	4	10.510.000	10.510.000	100,00	100,00
5.2.24.02	Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Unit	44	653.074.895	652.620.895	99,93	100,00
5.2.24.03	Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	Orang	100	19.580.000	19.580.000	100,00	100,00
Balai ESDM Wilayah Sumbawa							
5.2	BELANJA LANGSUNG			192.454.500	172.230.616	89,49	100,00
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	164.409.500	144.935.616	88,16	100,00
5.2.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	60	260.000	260.000	91,21	100,00
5.2.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	4	40.390.000	19.921.275	49,32	100,00

Kode	Program/Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
5.2.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	1	-	-	-	-
5.2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tahun	1	13.200.000	11.700.000	88,64	100,00
5.2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Orang	3	79.797.700	79.362.541	99,45	100,00
5.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis	24	1.724.300	1.724.300	100,00	100,00
5.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis	2	850.000	850.000	100,00	100,00
5.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	2	497.500	497.500	100,00	100,00
5.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis	2	240.000	240.000	100,00	100,00
5.2.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tahun	1	-	-	-	-
5.2.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tahun	1	27.450.000	27.450.000	100,00	100,00
5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	5.075.000	4.325.000	85,22	100,00
5.2.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Unit	2	5.075.000	4.325.000	85,22	100,00
5.2.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	%	100	5.600.000	5.600.000	100,00	100,00
5.2.15.13	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Izin	15	5.600.000	5.600.000	100,00	100,00
5.2.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	%	100	5.125.000	5.125.000	100,00	100,00
5.2.17.04	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Izin	12	5.125.000	5.125.000	100,00	100,00
5.2.18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	%	100	5.380.000	5.380.000	100,00	100,00
5.2.18.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah	Izin	10	5.380.000	5.380.000	100,00	100,00
5.2.24	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	%	100	6.865.000	6.865.000	100,00	100,00
5.2.24.01	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Usaha	10	6.865.500	6.865.500	100,00	100,00
Rata-Rata Realisasi Keuangan						84,88	
Rata-Rata Realisasi Fisik							91,45
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEUANGAN						84,88	

Realisasi keuangan sebesar 84,88% (Rp. 11.616.220.542,00) dan realisasi fisik sebesar 91,45%. Realisasi keuangan berasal dari Belanja Langsung sebesar Rp. 4.803.848.680,00 dan dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.812.371.862,00, Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 2.068.903.913,00 berasal dari sisa Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 640.811.138,00 dan sisa Belanja Langsung sebesar Rp. 1.428.092.775,00. Sisa Belanja Langsung berasal dari hasil efisiensi kegiatan yang dilaksanakan melalui lelang, perjalanan dinas, honor, paket pekerjaan fisik yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya SPD (Surat Penyediaan Dana) dan kegiatan lainnya.

Rendahnya realisasi fisik disebabkan oleh adanya empat buah sumur bor yang tidak dapat dilaksanakan pembangunannya akibat tidak tersedianya dana untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi dan analisis yang disajikan dalam LKjIP Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2020, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2020 sebagian besar dapat dicapai bahkan terlampaui. Indikator Kinerja sesuai Sasaran Strategis yang telah diperjanjikan tahun 2020 yang terdiri dari Rasio Elektrifikasi dan Cakupan Air Bersih. Capaian Rasio Elektrifikasi tahun 2020 sebesar 99,98% dari target 95,09% atau capaiannya sebesar 105,14%. Penambahan jumlah rumah tangga berlistrik selama tahun 2020 sebanyak 78.006 rumah tangga. Capaian cakupan air bersih untuk tahun 2020 sebesar 425 KK dari target 765 KK atau capaiannya sebesar 55,56%. Tidak tercapainya target indikator kinerja cakupan air bersih untuk tahun 2020 disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk pembangunan 4 unit sumur bor.

Keberhasilan dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama Rasio Elektrifikasi dikarenakan adanya pemilihan program/kegiatan yang tepat dilaksanakan pada tahun 2020. Program tersebut terdiri dari 5 (lima) program prioritas yang terkait dengan kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020. Program tersebut diantaranya :

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
- b. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
- c. Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah;
- d. Program pencegahan kerusakan lingkungan;
- e. Program pengembangan dan pemanfaatan energi.

Selain keberhasilan tersebut di atas, Dinas ESDM Provinsi NTB juga mencatat adanya beberapa permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Permasalahan tersebut timbul terkait dengan sub urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan dan sub urusan pemerintahan bidang energi baru terbarukan. Permasalahan bidang ketenagalistrikan walaupun Rasio Elektrifikasi di Provinsi NTB sudah mencapai 99,98% artinya bahwa masih ada 0,02% rumah tangga yang belum mendapatkan akses terhadap listrik, permasalahan lainnya adalah berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PLN Tahun 2019 sebanyak 19.514 rumah tangga mendapatkan listrik dengan cara menyalur dari tetangganya yang memiliki meter listrik PLN. Terhadap permasalahan tersebut diperlukan pendataan lebih rinci terkait dengan jumlah rumah tangga yang akan diintervensi melalui program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan melibatkan PLN, BPS, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan secara berkala.

Pengembangan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) ditempuh untuk mengatasi kebutuhan energi pada daerah-daerah yang memiliki akses konektivitas yang sulit seperti daerah kepulauan dan daerah perbatasan. Pembangunan infrastruktur EBT untuk saat ini masih sangat mahal dibandingkan dengan infrastruktur energi dan listrik yang menggunakan energi konvensional (fosil), sehingga sebagian besar Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai pembangunan EBT. Selain pembangunannya yang mahal fasilitas EBT tersebut tidak memerlukan biaya bahan bakar dalam mengoperasikannya dan umur pakai yang terbatas menjadi kendala dalam pemanfaatannya. Melalui program prioritas tersebut telah banyak dibangun infrastruktur EBT di seluruh pelosok tanah air termasuk di Provinsi NTB yang didanai melalui APBN. Banyak diantara fasilitas EBT yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sudah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Seringkali perbaikan terkendala oleh kepemilikan aset yang belum diserahkan ke daerah, sehingga daerah tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan. Sejak tahun 2019 sumber anggaran Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk membiayai pengembangan EBT sudah tidak ada lagi, diperlukan alternatif sumber dana lainnya selain Dana Alokasi Khusus yang dapat digunakan seperti pemanfaatan dana desa.

Laporan kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2020. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas ESDM Provinsi NTB dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun demikian diharapkan dapat memberikan gambaran hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas ESDM Provinsi NTB.

Beberapa hal tersebut diatas tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas dalam upaya memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar kinerja yang dihasilkan dapat lebih optimal dan memberi manfaat kepada masyarakat. Sehingga Visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang” dapat terwujud.

Kiranya LKjIP Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja. LKjIP ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Anggaran, dan Rencana Strategis tahun kedua periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2023 yang akan datang.

LAMPIRAN LKjIP TAHUN 2020

Lampiran - 1

TUJUAN DAN SASARAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB TAHUN 2019-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya pemanfaatan pertambangan mineral dan batubara secara efektif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan <i>Good Mining Practices</i>	2.17	4.00	6.60	7.20	8.00
2	Terwujudnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	94.46	95.09	95.72	96.35	97.00
3	Terwujudnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih	Cakupan masyarakat yang dapat akses air tanah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air minum dari sumber air tanah (KK)	2040	255	255	255	425
4	Terwujudnya perlindungan kawasan yang memiliki keanekaragaman geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi	Meningkatnya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi (situs)	3	3	3	3	3
5	Terwujudnya peningkatan Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi	Kontribusi Energi Baru Terbarukan terhadap total bauran energi (%)	Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (%)	5.50	6.62	5.96	5.64	5.57

Lampiran - 2

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi (Cakupan Listrik)	95,09%

Mataram, Desember 2019
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620825 199103 1 008

Lampiran - 3

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD / Unit Kerja : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran : 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	4,00%
		Jumlah IUP/IPR yang didata produksinya	45 Izin
		Jumlah IUP/IPR yang diawasi	45 Izin
		Jumlah perizinan pertambangan mineral logam yang diterbitkan	9 Izin
		Jumlah perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diterbitkan	102 Izin
2	Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat	Rasio Elektrifikasi	95,09%
		Jumlah perizinan ketenagalistrikan yang diterbitkan	30 Izin
		Jumlah Rumah Tangga yang dipasang listrik murah dan hemat	1955 RTS
		Jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang dibina dan diawasi	30 Izin
3	Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan yang bersumber dari air tanah	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih	1.190 KK
		Jumlah rencana teknis pemanfaatan air tanah	14 Buah
		Jumlah sumur bor yang dibangun	14 Unit
		Jumlah perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan	60 Izin
		Jumlah zona konservasi air tanah yang direview	3 Zona
4	Tersedianya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi	3 Situs
		Jumlah orang yang memahami bencana alam geologi	500

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Jumlah orang yang memahami keanekaragaman geologi	500 Orang
5	Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan	6,62%
		Jumlah pengelola pembangkit energi baru terbarukan yang terbina.	4 Buah
		Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan	44 Buah
		Jumlah peserta penyuluhan bidang energi	100 Orang

Mataram, Desember 2019
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620825 199103 1 008

Lampiran - 4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN PROVINSI NTB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar	4,00 %
2.	Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat	Rasio Elektrifikasi	95,09 %
3.	Terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat dari sumber air tanah.	Jumlah masyarakat yang terlayani air minum dari sumber air tanah	765 KK
4.	Meningkatnya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	Persentase situs geologi yang termanfaatkan	-
5	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi	14,17 %

Program

1. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
3. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah
4. Pencegahan Kerusakan Lingkungan
5. Pengembangan dan Pemanfaatan Energi

Anggaran

Rp. 67.202.557
 Rp. 1.413.232.900
 Rp. 2.707.629.656
 Rp. -
 Rp. 683.164.895

Keterangan

Sumber dana APBD, mendukung Misi 4 dan 5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dengan sasaran terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan indikator sasaran Rasio Elektrifikasi dan Cakupan Air Bersih

Mataram,

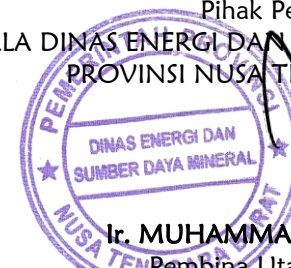
2020



Pihak Kedua,
 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE., M.Sc.

Pihak Pertama,
 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620825 199103 1 008

Lampiran - 5

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Unit Kerja/Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB
Triwulan/Tahun : IV (Empat) Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja					PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran			Fisik (%)
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
Meningkatnya usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	%	4.00	0.87	21,75	15. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	67.202.557	67.202.557	100	100
						15.04 Pendataan Hasil Produksi dibidang Pertambangan	18.607.500	18.607.500	100	100
						15.10 Pengawasan usaha pertambangan	13.301.957	13.301.957	100	100
						15.12 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Logam	11.830.000	11.830.000	100	100
						15.13 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	23.463.100	23.463.100	100	100
	Jumlah sasaran 1						67.202.557	67.202.557	100	100
Terwujudnya peningkatan cakupan layanan listrik	Rasio Elektrifikasi	%	95.09	99.98	105.14	17. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1.413.232.900	1.413.112.750	99.99	100
						17.02 Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	17.547.000	17.547.000	100	100
						17.03 Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	1.387.178.400	1.387.058.250	99.99	100
						17.04 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	8.507.500	8.507.500	100	100
	Jumlah sasaran 2						1.413.232.900	1.413.112.750	99.99	100
Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan yang bersumber dari air tanah	Jumlah masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih	KK	765	425	55.56	18. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	2.707.629.656	1.345.112.539	49.68	57.07
						18.01 Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	18,230,000	18,230,000	100	100
						18.02 Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	2.649.972.628	1.287.455.511	48.58	56.14
						18. 03 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	38.109.628	38.109.628	100	100
						18.04 Konservasi Air Tanah	1.317.400	1.317.400	100	100
	Jumlah sasaran 3						2.707.629.656	1.345.112.539	49.68	57.07
		Situs	-	-	-	22. Program pencegahan kerusakan lingkungan	-	-	-	

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja					PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran			Fisik (%)
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
Tersedianya situs geologi sebagai Cagar Alam Geologi	Jumlah situs geologi yang dilindungi	Situs	-	-	-	22.01 Mitigasi rawan bencana alam geologi	-	-	-	-
						22.02 Pengelolaan kawasan lindung geologi	-	-	-	-
Jumlah sasaran 4							-	-	-	-
Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang bersumber energi baru terbarukan	Kontribusi Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan	%	6.62	8.49	128.25	24. Program Pengembangan dan pemanfaatan energi	683.164.895	682.710.895	99.93	100
						24.01 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	10.510.000	10.510.000	100	100
						24.02 Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	653.074.895	652.620.895	99.93	100
						24.03 Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	19.580.000	19.580.000	100	100
Jumlah sasaran 5							683.164.895	682.710.895	99.93	100

b. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pencapaian Target RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2019 di Provinsi NTB sesuai dengan Misi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah untuk mendukung Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Sasaran pada Misi 5 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM Provinsi NTB adalah terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan indikator sasaran berupa Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi juga masuk dalam Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi NTB nomor 71 dengan target pada tahun 2020 sebesar 95,09%.

Realisasi Rasio Elektrifikasi pada tahun 2020 sebesar 99,98% dari target tahun 2020 sebesar 95,09% dengan capaian sebesar 105,14%. Rasio elektrifikasi tahun 2019 sebesar 99,98% artinya masih 0,02% rumah tangga belum mendapatkan layanan listrik. Capaian rasio elektrifikasi tersebut banyak didukung oleh kinerja PLN dalam meningkatkan kapasitas pembangkit dan jaringan melalui program Pemerintah Pusat pembangunan 35.000 MW di seluruh Indonesia. Berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 akan dibangun tambahan pembangkit listrik sebesar 500 MW di Provinsi NTB baik yang dibangun oleh PLN maupun oleh Independent Power Producer (IPP). Hal tersebut menjadikan kebutuhan listrik masyarakat dapat dipenuhi dan rasio elektrifikasi meningkat secara signifikan. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas ESDM Provinsi NTB melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan melalui pemasangan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin yang belum mendapatkan akses terhadap listrik.

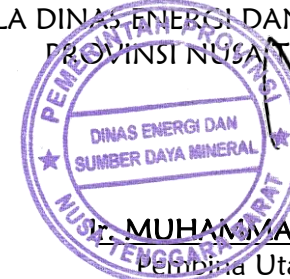
c. Permasalahan dan Upaya Pemecahan masalah dalam rangka Pencapaian Target RPJMD

PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH	UPAYA KEDEPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA SKPD
Masih ada sekitar 0,02% penduduk NTB belum menikmati layanan listrik, terutama <i>Remote Area</i> yang sulit terjangkau PLN, namun demikian berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2019 sebanyak 19.514 rumah tangga masih mendapatkan layanan listrik dengan cara menyalur dari tetangga.	a. Sejak tahun 2012 telah dilaksanakan pemasangan listrik murah dan hemat (listrik gratis) bagi masyarakat tidak mampu (miskin) melalui pembiayaan APBN dan APBD. Sampai dengan tahun 2020 telah dilakukan pemasangan listrik murah dan hemat sebanyak 26.532 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Kedepan, kegiatan pemasangan listrik murah dan hemat akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi NTB dengan melibatkan <i>stakeholder</i> Pemerintah maupun swasta melalui CSR. b. Untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau jaringan Listrik PLN, pemerintah akan berupaya membuka akses listrik dengan mengembangkan Energi Terbarukan, dengan dukungan pembiayaan baik APBD maupun APBN.	Terkait masih adanya 19.514 rumah tangga yang mendapatkan listrik dengan cara menyalur, akan dilakukan pendataan lebih rinci dengan melibatkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, PT, PLN, BPS, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Cacatan Sipil untuk mendapatkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Desa berlistrik Provinsi NTB sudah mencapai 100% dari 1.143 desa/kelurahan, 6 desa diantaranya masih menggunakan listrik yang bersumber dari Non PLN yang semuanya berada di Pulau Sumbawa. Namun demikian masih 44 dusun di Provinsi NTB belum berlistrik.	Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas ESDM telah menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Provinsi NTB dan PLN UIP NTB terkait dengan pengembangan jaringan distribusi listrik ke daerah-daerah yang belum dialiri listrik PLN. Koordinasi tersebut terkait dengan dukungan aksesibilitas jalan yang akan dilalui oleh PLN dalam pengembangan jaringan hingga ke daerah-daerah terpencil.	Meningkatkan koordinasi lebih intensif dalam bentuk kerjasama terkait dengan tukar menukar data dan informasi dan proses perencanaan yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan PLN terkait pembangunan dan pengembangan listrik perdesaan.

PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH	UPAYA KEDEPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA SKPD
Banyak diantara fasilitas energi baru terbarukan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sudah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Seringkali perbaikan terkendala oleh kepemilikan aset yang belum diserahkan ke daerah, sehingga daerah tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan.	Sejak tahun 2016 sampai 2018 Pemerintah Provinsi mulai mendapatkan alokasi DAK bidang Energi Skala Kecil. Dalam berbagai forum pertemuan telah disampaikan agar DAK tersebut juga dapat digunakan untuk revitalisasi infrastruktur energi baru terbarukan yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat.	Mendorong Pemerintah Pusat menginventarisai aset infrastruktur energi baru terbarukan yang mengalami kerusakan untuk segera dilakukan perbaikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Mendorong langkah-langkah percepatan penyerahan infrastruktur energi baru terbarukan kepada daerah, agar daerah dapat mengalokasikan anggaran perbaikan. Sejak tahun 2019 Pemerintah tidak lagi mengalokasikan anggaran bagi pengembangan energi terbarukan, diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang Pemerintah kembali akan memberikan alokasi anggaran untuk pengembangan energi skala kecil. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan dana desa bagi pengembangan EBT khususnya pada desa-desa yang mengandalkan kebutuhan energinya bersumber dari EBT.

- d. Prestasi SKPD di tingkat Provinsi.
Untuk tahun 2020 tidak ada prestasi maupun penghargaan yang diraih Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB.

Mataram, 15 Januari 2021
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Dr. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620825 199103 1 008



Dinas ESDM Provinsi NTB



@DESDMNTB



@desdmntb



desdm@ntbprov.go.id



www.desdm.ntbprov.go.id